

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENGARUH PENDIDIKAN DAN PERKAWINAN  
USIA DINI TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA**



**RAHMI MARTINA  
NIM. 160602180**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
1441H/2020M**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rahmi Martina  
NIM : 160602180  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juli 2020

Yang Menyatakan,



Rahmi Martina

## PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### Analisis Pengaruh Pendidikan dan Perkawinan Usia Dini Terhadap Kemiskinan di Indonesia

Disusun Oleh:

Rahmi Martina  
NIM. 160602180

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Zuhilmi, S. Ag., MA  
NIP. 197204282005011003

Hafizh Maulana, SP., S.H.I., M.E  
NIDN. 2006019002

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY  
Menghetahui  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007

## PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### Analisis Pengaruh Pendidikan dan Perkawinan Usia Dini Terhadap Kemiskinan di Indonesia

Rahmi Martina  
NIM. 160602180

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam  
bidang Ekonomi Syariah

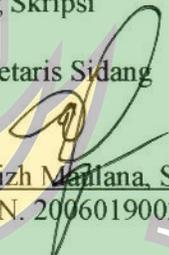
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 29 Juli 2020 M  
8 Zulhijah 1441 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua Sidang

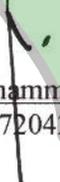
Sekretaris Sidang

  
Dr. Muhammad Zuhilmi, S. Ag., MA  
NIP. 197204282005011003

  
Hafizh Maulana, SP., S.H.I., M.E  
NIDN. 2006019002

Penguji I

Penguji II

  
Dr. Muhammad Adnan, SE., M. Si  
NIP. 197204281999031005

  
Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak.CA.  
NIP. 198307092014032002

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Zaki Fuad, M. Ag.  
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id) Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rahmi Martina  
NIM : 160602180  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail : 160602180@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  KKKU  Skripsi  .....  
yang berjudul:

**Analisis Pengaruh Pendidikan dan Perkawinan Usia Dini Terhadap Kemiskinan di Indonesia**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 29 Juli 2020

Mengetahui

Penulis

Rahmi Martina  
NIM. 160602180

Pembimbing I

Dr. Muhammad Zuhilmi, S. Ag., MA  
NIP. 197204282005011003

Pembimbing II

Hafizh Maulana, SP., S.H.I., M.E  
NIDN. 2006019002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Pengaruh Pendidikan dan Perkawinan Usia Dini Terhadap Kemiskinan di Indonesia”** Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE., Ak., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D dan Rina Desiana, M.E selaku dosen perwakilan Prodi Ekonomi Syariah di

Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Dr. Muhammad Zuhilmi, S. Ag., MA selaku pembimbing I dan Cut Dian Fitri, S.E.,M.Si.,Ak.CA selaku pembimbing II yang tak bosan-bosannya memberi arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Dr. Muhammad Adnan, SE., M. Si dan Cut Dian Fitri, S.E.,M.Si.,Ak.CA., selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan kritik dan sarannya terhadap skripsi saya sehingga penulisan skripsi ini jauh lebih baik.
6. Dr. Zaki Fuad Chalil M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah.
7. Bapak dan Ibuk dosen selaku pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
8. Ucapan terimakasih yang teristimewa dengan penuh penghormatan dan kasih sayang, Orang tua tercinta dan terkasih ayahanda Eliansyah dan Ibunda Radhiah yang telah memberikan cinta yang tulus dan ikhlas yang selalu mengiringi setiap langkah kepada saya serta membesarkan, mendidik, dan mengorbankan segalanya dalam menuntut ilmu dan memberikan nasehat, doa restu, serta dukungan dan jasa yang tidak ternilai harganya yang telah diberikan selama ini. Teruntuk kakak saya Reni Andya yang telah

memberikan semangat serta motivasi dalam menjalankan perkuliahan dan menyelesaikan perkuliahan ini guna untuk memperoleh gelar sarjana dan ilmu yang diperoleh berguna bagi seluruh umat di muka bumi ini.

9. Teman-teman seperjuangan yaitu mahasiswa S1 Ekonomi Syariah atas segala dukungan yang pernah diberikan agar penulis bisa dengan cepat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Banyak pihak yang tidak dapat dituliskan dalam lembaran kertas ini, namun jasa dan bantuannya tidak pernah dilupakan. Karena itu, dari lubuk hati yang dalam dan tulus, diucapkan terimakasih untuk semua bantuan yang telah diberikan.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis mengaharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga Tugas Akhir ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Banda Aceh, 29 Juli 2020  
Penulis,

Rahmi Martina

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M

10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ş	29	ي	Y
15	ض	D			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I

◌ُ	<i>Dammah</i>	U
----	---------------	---

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَّ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

*kaifa* : كيف

*haura* : هول

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ/ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā

	atau ya	
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

*qāla* : قَالَ

*ramā* : رَمَى

*qīla* : قِيلَ

*yaqūlu* : يَقُولُ

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*raudah al-atfāl/ raudatul atfāl* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

*al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

*Ṭalḥah* : طَلْحَةٌ

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Rahmi Martina  
NIM : 160602180  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis  
Islam/Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Pengaruh Pendidikan dan  
Perkawinan Usia Dini Terhadap  
Kemiskinan di Indonesia  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag.,  
M.A.  
Pembimbing II : Haffizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E  
Kata Kunci : Pendidikan, AMH, Perkawinan  
Usia Dini, Kemiskinan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan perkawinan usia dini terhadap kemiskinan di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data pendidikan, data perkawinan usia dini, dan data persentase kemiskinan tahun 2015 sampai 2019 yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional. Metode yang digunakan untuk menganalisis pengaruh pendidikan dan perkawinan usia dini terhadap kemiskinan adalah metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel pendidikan dan perkawinan usia dini berpengaruh terhadap kemiskinan. Secara parsial pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan dan juga perkawinan usia dini berpengaruh terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka sebaiknya pemerintah membuat kebijakan dukungan yang tinggi agar angka kemiskinan di Indonesia yang masuk dalam data Badan pusat Statistik dapat semakin menurun.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPEL KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>11</b>
2.1 Kemiskinan.....	11
2.1.1 Indikator Kemiskinan .....	14
2.1.2 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan .....	18
2.1.3 Kemiskinan Dalam Perspektif Islam .....	19
2.2 Pendidikan .....	23
2.2.1 Indikator Pendidikan.....	25
2.2.2 Fungsi Pendidikan Dalam Ekonomi .....	27
2.2.3 Pendidikan dalam Perspektif Islam .....	29
2.3 Studi Literatur Tentang Perkawinan Usia Dini .....	33
2.3.1. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Dini .....	37
2.3.2 Perkawinan Dini dalam Perspektif Islam.....	39
2.4 Keterkaitan Antar Variabel.....	43

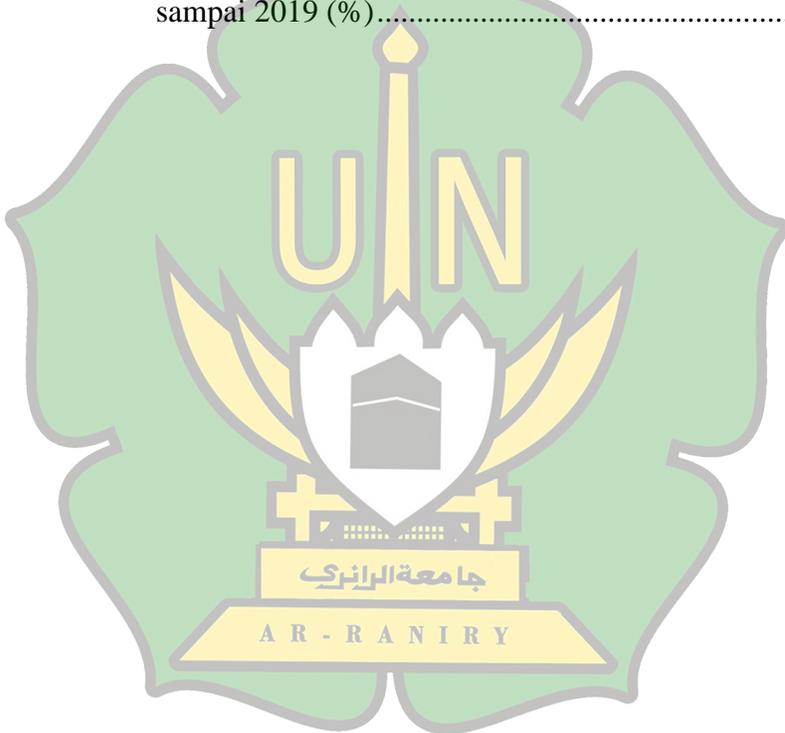
	Halaman
2.4.1 Hubungan Antara Pendidikan terhadap Kemiskinan.....	43
2.4.2 Hubungan Antara Perkawinan Usia Dini terhadap Kemiskinan.....	45
2.5 Penelitian Terdahulu.....	47
2.6 Kerangka Penelitian.....	53
2.7 Hipotesis Penelitian.....	53
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>55</b>
3.1 Desain Penelitian.....	55
3.2 Data dan Sumber Data.....	55
3.3 Operasional Variable.....	56
3.4 Model Penelitian.....	57
3.5 Teknik Analisis Data.....	57
3.5.1 Penentuan Model Estimasi.....	58
3.5.2 Tahapan Pengujian Model.....	59
3.6 Pengujian Hipotesis.....	62
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>65</b>
4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	65
4.1.1 Kemiskinan.....	66
4.1.2 Pendidikan.....	69
4.1.3 Perkawinan Usia Dini.....	71
4.2 Analisis Data.....	72
4.2.1 Penentuan Model Estimasi.....	72
4.2.2 Uji Kriteria Statistik (Uji Signifikansi).....	75
4.3 Asumsi Klasik.....	77
4.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	77
4.5 Pembahasan dan Hasil.....	79
4.5.1 Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan.....	79
4.5.2 Pengaruh Perkawinan Usia Dini terhadap Kemiskinan.....	80
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Keterbatasan.....	83
5.3 Saran.....	83

	Halaman
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>89</b>



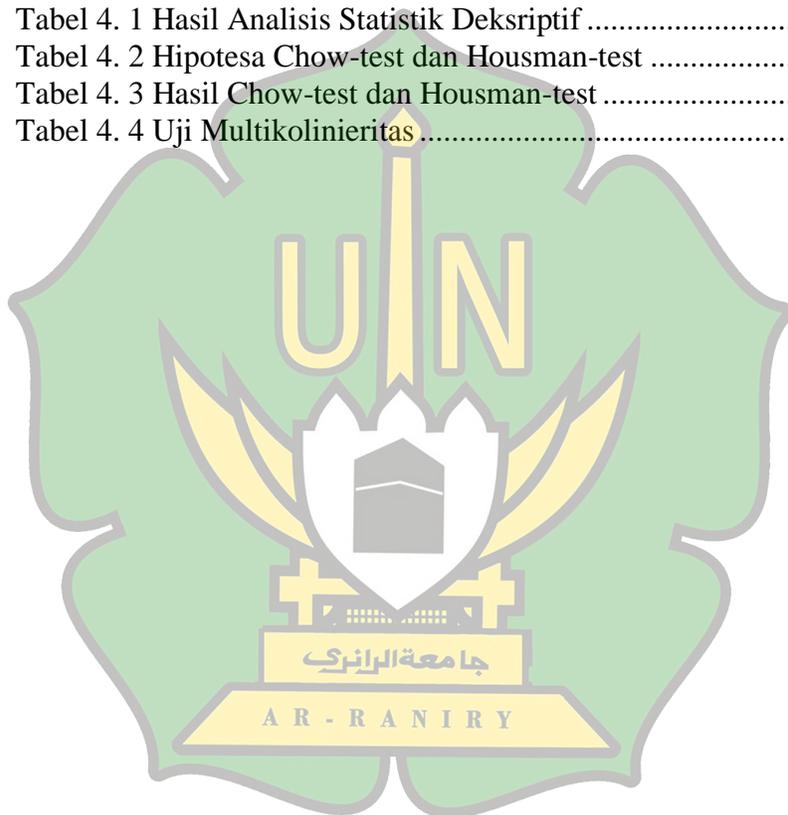
## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. 1 Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015 sampai 2019 (%) .....	2
Grafik 1. 2 Pendidikan Indikator Angka Melek Huruf (AMH) di Indonesia Tahun 2015 sampai 2019 (%) .....	4
Grafik 1. 3 Perkawinan Usia Dini di Indonesia Tahun 2015 sampai 2019 (%) .....	5



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	50
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel .....	56
Tabel 4. 1 Hasil Analisis Statistik Dekriptif .....	65
Tabel 4. 2 Hipotesa Chow-test dan Housman-test .....	73
Tabel 4. 3 Hasil Chow-test dan Housman-test .....	74
Tabel 4. 4 Uji Multikolinieritas .....	77



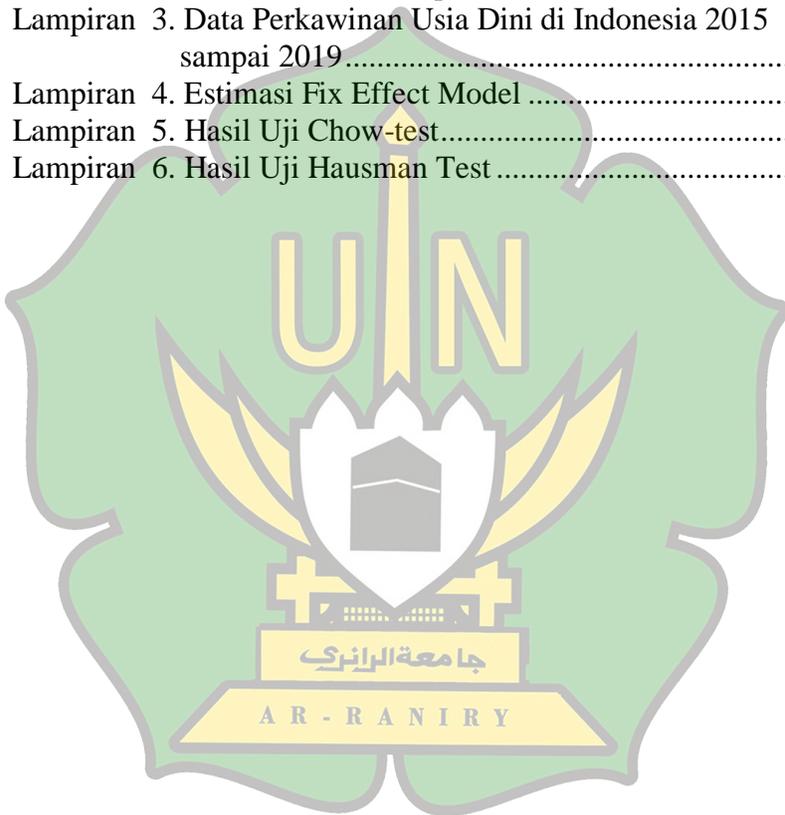
## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Skema Pemikiran .....	53
Gambar 4. 1 Persentase Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015 sampai 2019.....	67
Gambar 4. 2 Persentase Pendidikan (AMH) di Indonesia tahun 2015 sampai 2019.....	69
Gambar 4. 3 Persentase Perkawinan Usia Dini tahun 2015 hingga 2019 .....	71
Gambar 4. 4 Ringkasan Hasil dari Estimasi Fix Effect Model ..	75



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Persentase Kemiskinan di Indonesia tahun 2015 sampai 2019.....	89
Lampiran 2. Data Pendidikan Angka Melek Huruf (AMH) di Indonesia 2015 sampai 2019 .....	90
Lampiran 3. Data Perkawinan Usia Dini di Indonesia 2015 sampai 2019.....	91
Lampiran 4. Estimasi Fix Effect Model .....	92
Lampiran 5. Hasil Uji Chow-test.....	93
Lampiran 6. Hasil Uji Hausman Test .....	94



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dialami individu, kelompok dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimumnya (Rustanto, 2015:2). Kemiskinan dipandang sebagai suatu keadaan dimana seorang individu atau sekelompok orang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dan memiliki standart tertentu (Badan Pusat Statistik, 2000).

Di dalam Islam, kemiskinan dipandang sebagai masalah yang membahayakan jiwa dan iman seseorang karena sangat dekat dengan kekufuran. Dengan hidup miskin, seseorang tidak dapat melaksanakan kewajiban agama secara maksimal, tidak dapat mengecap pendidikan yang baik, dan akses kehidupan dan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, Islam melarang umatnya meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, baik secara agama, ilmu, maupun ekonomi kesejahteraan (Sukmawati, dkk 2018) sebagaimana Allah berfirman dalam QS An-Nisa: 9 yang artinya:

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, dan hendaklah*

*mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka bertutur kata yang benar” (Q.S. An-Nisa’:9).*

Angka kemiskinan menjadi suatu tolak ukur dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah, baik di daerah maupun pusat. BPS Indonesia dalam publikasinya menunjukkan persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 11,17% dari total penduduk Indonesia 258,4 juta jiwa dan menurun menjadi 10,78% pada tahun 2016. Selanjutnya turun pada tahun 2017 menjadi 10,38% dan menjadi 9,74% pada tahun 2018. Pada periode tahun 2019 juga menurun menjadi 9,31% dari total penduduk Indonesia 269,6 juta jiwa yang merupakan angka terendah selama kurun waktu lima tahun. Hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah.

**Grafik 1. 1 Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015 sampai 2019 (%)**

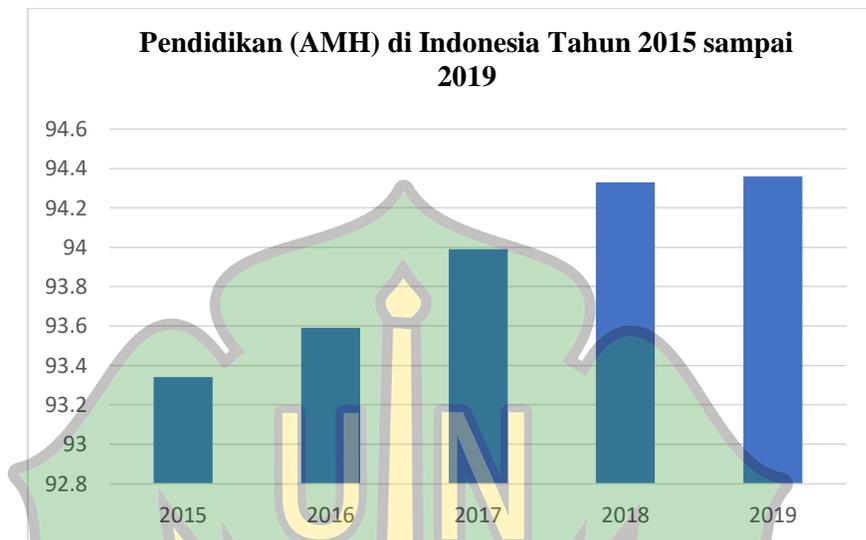


Sumber : BPS Indonesia (2020, diolah).

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan diantaranya yaitu: rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan kondisi keterisolasian (Kartasasmita, 1996: 240). Masih banyak masyarakat miskin di Indonesia, disebabkan oleh pendidikan yang rendah dan juga perkawinan usia dini. Pendidikan dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena, pendidikan dianggap mampu untuk menghasilkan tenaga kerja yang bermutu tinggi, mempunyai pola pikir dan cara bertindak yang modern. Sumber daya manusia seperti inilah yang diharapkan mampu menggerakkan roda pembangunan ke depan. Salah satu upaya dalam mewujudkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan ini dikenal dengan kebijakan link and match.

Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan dan mengefisienkan sumber daya manusia dengan sistem pendidikan. Semakin selaras struktur tenaga kerja yang disediakan oleh sistem pendidikan dengan struktur lapangan kerja maka semakin efisien sistem pendidikan yang ada. Karena dalam pengalokasian sumber daya manusia akan diserap oleh lapangan kerja dan juga akan meminimalisir kemiskinan (Fadhilah Rahmawati, dkk, 2004).

**Grafik 1. 2 Pendidikan Indikator Angka Melek Huruf (AMH) di Indonesia Tahun 2015 sampai 2019 (%)**



*Sumber: BPS Indonesia (2020, diolah).*

Angka Melek Huruf (AMH) di Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 sebesar 93,34% dan meningkat menjadi 93,59 % pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017 menjadi 93,99 dan 2018 menjadi 94,33% pada 2018. Pada periode tahun 2019 juga meningkat menjadi 94,36%. Dengan meningkatnya Pendidikan di Indonesia menjadikan ekonomi yang semakin membaik dan membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera.

**Grafik 1. 3 Perkawinan Usia Dini di Indonesia Tahun 2015 sampai 2019 (%)**



Sumber: BPS Indonesia (2020, diolah).

Sejak dilahirkan ke dunia, manusia sudah mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui ikatan pernikahan untuk membentuk sebuah rumah tangga (keluarga). Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral di kalangan masyarakat dan bagian dari ibadah. Allah telah menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan. Allah memberikan karunia kepada manusia dengan adanya sebuah ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan ini bertujuan untuk melanjutkan keturunan atau generasi penerusnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Usia antara 20 sampai 24 tahun merupakan saat terbaik untuk menikah, selain untuk keutuhan rumah tangga. Rentang usia ini juga paling baik untuk mengasuh anak pertama. Senada dengan hal tersebut. Idealnya untuk menikah adalah pada saat dewasa awal yaitu berusia 20 tahun sebelum 30 tahun untuk wanita sedangkan untuk laki-laki adalah 25 tahun keatas. Mengingat baik secara biologis dan psikis sudah matang, sehingga fisiknya untuk memiliki keturunan sudah cukup matang. Artinya risiko melahirkan anak cacat atau meninggal itu tidak besar (Adhim: 2002).

Perkawinan dini pada wanita di duga karena rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi. Hal ini dilatarbelakangi alasan kemiskinan karena tidak mampu membiayai sekolah anaknya sehingga orang tua ingin anaknya segera menikah, ingin lepas tanggung jawab, dan orang tua berharap setelah

anaknyanya menikah akan mendapat bantuan secara ekonomi. Pada umumnya mereka hanya tamat SD, SLTP, atau SLTA, dengan kondisi tersebut daripada menjadi beban keluarga akhirnya orang tua menganjurkan anaknya segera menikah terutama pada anak perempuan. Sementara itu dari segi sosial budaya, umumnya terjadi karena adanya pemikiran seperti takut anaknya menjadi perawan tua. Kebanggaan apabila anaknya cepat dilamar dan juga ingin mengurangi beban (tanggung jawab) sebagai orang tua apabila anaknya telah menikah.

Program yang berkaitan dengan kependudukan yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk salah satunya adalah program Pendewasaan Usia Perkawinan. Pendewasaan usia perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Penundaan Usia perkawinan bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar kehamilan pertama pun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Banyak masalah yang menyebabkan terjadinya kasus rendahnya umur perkawinan pertama seperti masalah ideologi, budaya, masyarakat, keluarga, individu, dan ekonomi. Namun, penyebab terjadinya paling dominan terjadi di masyarakat adalah masalah ekonomi keluarga atau kemiskinan.

Berdasarkan penerapan data tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kemiskinan di Indonesia karena

kurangnya tingkat pendidikan dan semakin banyaknya usia perkawinan usia dini **“Analisis Pengaruh Pendidikan dan Tingkat Perkawinan Usia Dini Terhadap Kemiskinan di Indonesia”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia?
2. Bagaimana tingkat usia perkawinan dini berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia?
3. Bagaimana pendidikan dan tingkat usia perkawinan dini berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat dijelaskan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh Pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh Tingkat usia perkawinan dini terhadap kemiskinan di Provinsi Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh pendidikan dan tingkat perkawinan usia dini terhadap kemiskinan di Indonesia.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Disusunnya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan banyak manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan mengenai pengaruh letak wilayah terhadap pendidikan, jumlah kasus pernikahan dini dan tingkat kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini juga dapat menambah referensi mengenai kasus dan tingkat kemiskinan.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan informasi kepada para pengambil kebijakan pada pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah serta instansi terkait dalam menentukan langkah-langkah kebijakan untuk mengoptimalkan Pendidikan yang lebih bermutu, mengoptimalkan pernikahan dini sebijak mungkin dan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

### 3. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi masyarakat khususnya dapat memberi masukan terhadap calon suami istri yang ingin menikah dini sebelum menikah sehingga terhindar dari kasus perceraian yang dapat mengakibatkan kurangnya

pendidikan agar dapat menanggulangnya apabila berada di dalam ekonomi yang rendah.

### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Adapun susunan sistematika dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini merupakan kerangka teori dan landasan teori serta pembangunan hipotesis yang terdiri dari teori, temuan penelitian terkait, model penelitian atau kerangka berpikir, serta pengembangan hipotesis penelitian.

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, operasional variabel, metode penelitian dan tahapan penelitian.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini merupakan pelaporan hasil penelitian dan pembahasan yang mengaitkan dengan kerangka teori atau penelitian yang dilakukan.

#### **BAB V PENUTUP**

Bagian ini merupakan bab terakhir dari isi pokok penelitian terdiri dari simpulan dan saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kemiskinan**

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Lebih lanjut disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan atau batas kemiskinan (Rejekiningsih, 2011). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.400 kilo kalori per kapita per hari. Garis kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan (BPS RI, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau

sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman dari tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Menurut Chambers dalam Nasikun, dkk (2017), kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut, yaitu: pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan, dan kesehatan pendidikan yang dioerlukan untuk bisa hidup berkelanjutan.
2. Kemiskinan Relatif, yaitu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan Kultural, yaitu mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan malas,

pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

4. Kemiskinan Struktural, yaitu situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi menyebabkan substansi kemiskinan.

Suatu ukuran yang pasti untuk menentukan batas kemiskinan tidaklah mudah, tetapi para fuqaha mazhab seperti Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan miskin ialah orang yang masih mampu berusaha memperoleh harta secara halal, tetapi hasilnya tidak mencukupi bagi dirinya dan keluarganya. Sedangkan golongan Hanafiyah mendefinisikan miskin ialah yang tidak memiliki sesuatu (harta atau tenaga) (Qadir, 2001).

Berdasarkan gambaran batasan fakir miskin di atas, maka kedua sifat yang melekat pada dua terminologi itu disebut kemiskinan (al-miskin). Kata fakir mempunyai pengertian lebih umum bagi orang yang tidak memiliki harta yang termasuk di dalamnya miskin. Lebih dipopulerkannya terminologi miskin daripada fakir karena secara kuantitas orang yang berstatus miskin lebih banyak dari yang fakir, yang pasti keduanya serba berkekurangan. Penyebab mereka menjadi fakir miskin bukanlah sepenuhnya oleh faktor internal atau kesalahan mereka sendiri, tetapi lebih dominan disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu sebagai akibat tidak berjalannya sistem dan norma-norma keadilan,

yang berpangkal dari orang-orang kayayang menekankan hak dari golongan dhuafa (orang yang dianggap lemah ekonomi dan fisiknya) ini yang terdapat dalam harta mereka tanpa menjalankan fungsi harta dan kepemilikan melalui berbagai institusi ekonomi Islam (Qadir, 2001).

### **2.1.1 Indikator Kemiskinan**

Beberapa macam ukuran yang seringkali digunakan sebagai indikator kemiskinan, antara lain: tingkat konsumsi beras per tahun, tingkat pendapatan, kesejahteraan masyarakat dan indeks kemiskinan manusia (Setiadi, 2011).

#### **1. Tingkat Konsumsi Beras Pertahun**

Secara umum menurut Sayogyo (2000) kemiskinan diukur dengan menghitung jumlah penduduk yang memiliki pendapatan per kapita yang tidak mencukupi untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang nilainya ekuivalen dengan 20 kg beras per kapita per bulan untuk daerah pedesaan, dan 30 kg beras untuk daerah perkotaan. Standar kecukupan pangan dihitung setara 2.100 kilo kalori per kapita per hari ditambah dengan pengeluaran untuk kebutuhan non makanan (perumahan, berbagai barang dan jasa, pakaian). Selama periode tahun 1970-an hingga awal tahun 1990-an Indonesia cukup berhasil menurunkan tingkat kemiskinan. Menurut World Bank (2006) tercatat pada periode tersebut poverty head count rate di Indonesia

turun sampai dengan 28,6 persen. Ketika krisis ekonomi menimpa Indonesia pada pertengahan tahun 1997, angka kemiskinan kembali meningkat dan mencapai puncaknya pada tahun 1999 menjadi sebesar 23 persen, kemudian angka tersebut kembali turun menjadi 16 persen pada tahun 2005. Namun demikian tahun 2006 angka kemiskinan kembali meningkat sebesar 1,75 persen sehingga menjadi 17,75 persen. Salah satu pemicu kenaikan angka kemiskinan ini adalah naiknya harga beras sebagai akibat dari larangan impor beras (World Bank: 2006). Dampak dari adanya kenaikan harga beras dengan tingkat kemiskinan memang sangat erat karena beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia terutama bagi mereka yang kurang mampu.

## 2. Tingkat Pendapatan

Batas garis kemiskinan antara daerah perkotaan dan pedesaan, persentase penduduk miskin di Indonesia laporan tahun 2013 yang dikeluarkan BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin yaitu penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Adanya kecenderungan bahwa jumlah penduduk miskin sebagian besar terkonsentrasi di daerah pedesaan. Hal ini mengidentifikasikan rendahnya kualitas hidup masyarakat di pedesaan. Adanya ketimpangan dalam pola pembangunan dan belum termanfaatkannya sumber

daya yang ada di pedesaan secara menyeluruh hanya merupakan sedikit dari sekian banyak permasalahan yang menyebabkan keterbelakangan di daerah tersebut. Perbedaan yang mencolok pada penetapan garis kemiskinan antara daerah pedesaan dan perkotaan karena dinamika kehidupan yang berbeda antara keduanya. Penduduk di daerah perkotaan memiliki kebutuhan yang relatif sangat beragam dibandingkan dengan daerah pedesaan. Sehingga mempengaruhi pola pengeluaran mereka.

### 3. Kesejahteraan Masyarakat

Indikator kesejahteraan ini dilihat dari 9 komponen, yaitu kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi dan kebebasan. Namun, yang sering digunakan hanya 4 komponen, yaitu kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan dan perumahan. Sedangkan indikator yang lainnya sulit diukur dan sulit dibandingkan antar daerah atau antar waktu.

### 4. Indeks Kemiskinan Manusia

Indeks ini diperkenalkan oleh United National Development Program (UNDP) dalam salah satu laporan tahunan yaitu Human Development Report. Indeks ini terlahir karena ketidakpuasan UNDP dengan indikator pendapatan per dollar per hari yang digunakan oleh Bank Dunia sebagai tolak ukur kemiskinan disuatu wilayah atau Negara. Dengan

adanya indeks ini, UNDP sengaja mengganti ukuran kemiskinan dari segi pendapatan dengan ukuran dari segi pendapatan kualitas hidup manusia. Argumen umum yang di gunakan oleh UNDP adalah bahwa tolaka ukur kemiskinan dari seseorang adalah jika dia tidak mampu menjangkau terhadap sarana publik dasar dan tingkat kualitas hidup mereka sendiri adalah rendah. Ada tiga nilai pokok yang menentukan tingkat kemiskinan, yaitu tingkat kehidupan, tingkat pendidikan dasar dan tingkat kemampuan ekonomi. Oleh kaeran itu, nilai indeks kemiskinan manusia mempresentasikan proporsi jumlah penduduk di suatu wilayah yang kehilangan tiga nilai pokok tersebut. Indeks kemiskinan manusia yang rendah menunjukkan tingkat kemiskinan yang rendah pula, begitu juga sebaliknya (Arsyat, 2015).

Dalam Islam banyak muncul pengertian mengenai kemiskinan disebabkan tolak ukur kemiskinan yang digunakan berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Al-Ghazali mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri, baik dari segi kebutuhan material dan kebutuhan rohani. Islam menganggap kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat.

### 2.1.2 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan di negara-negara berkembang disebabkan karena kebutuhan manusia yang bermacam-macam, adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, hal ini terlihat bahwa mayoritas penduduk miskin hanya memiliki sumber daya alam dalam jumlah yang terbatas. Selain itu, tingkat pendidikan juga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang rendah tentunya akan mengakibatkan ketidakmampuan dalam mengembangkan diri dan menyebabkan sempitnya peluang dalam mendapatkan lapangan pekerjaan, sehingga mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran disuatu negara ini, yang selanjutnya dapat menyebabkan kemiskinan. Menurut pendapat Suyanto dalam Basri (2002), ada tiga faktor penyebab terjadinya kemiskinan dipedesaan maupun diperkotaan, yaitu:

1. Sempitnya penguasaan dan pemilikan lahan atau akses produksi lain, ditambah lagi kurangnya ketersediaan modal yang cukup untuk usaha.
2. Karena nilai tukar hasil produksi yang semakin jauh tertinggal dengan hasil produksi lain, termasuk kebutuhan hidup sehari-hari.
3. Karena tekanan perangkat kemiskinan dan ketidaktahuan masyarakat, dengan artian mereka terlalu relatif terisolasi atau tidak memiliki akses yang cukup untuk memperoleh

informasi-informasi yang dibutuhkan. Disamping itu masyarakat secara fisik lemah karena kurang gizi, mudah terserang penyakit dan tidak berdaya atau rentan.

Masalah kemiskinan di Indonesia tidak hanya melanda di perkotaan saja namun juga di pedesaan, dimana sebagian besar kemiskinan terjadi di wilayah desa. Faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas merupakan permasalahan yang akan memperparah kondisi perekonomian yang menyebabkan kemiskinan. Salah satu ciri kondisi kemiskinan adalah tidak adanya sarana prasarana yang dibutuhkan serta kualitas lingkungan yang kumuh dan tidak layak huni. Kemiskinan juga mencakup masalah struktural dan multidimensional yang mencakup sosial dan politik. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa faktor penyebab kemiskinan sangat kompleks dan saling mempengaruhi, artinya kemiskinan terjadi bukan disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi multi faktor. Namun demikian, dapat dipahami bahwa faktor dominan yang menyebabkan terjadinya kemiskinan adalah sempitnya lapangan pekerjaan mengakibatkan terjadinya pernikahan dini, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang disebabkan oleh pendidikan, sumber daya alam terbatas dan kebijakan pemerintah.

### **2.1.3 Kemiskinan Dalam Perspektif Islam**

Berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah yang diaplikasikan dalam wujud

kebijakan dan program-program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kebijakan bersifat langsung yaitu berupa program yang langsung diberikan kepada penduduk miskin, contohnya bantuan tunai langsung (BLT) dan raskin, sedangkan kebijakan tidak langsung, contohnya program Jamkesmas, program IDT, dan dana BOS. Walaupun telah dilakukan berbagai upaya namun kemiskinan tidak dapat dihilangkan seluruhnya, artinya fenomena kemiskinan dengan mudah dapat dijumpai di hampir seluruh wilayah baik di perkotaan maupun di perdesaan. Program pengentasan kemiskinan yang saat ini dilakukan baik yang berasal dari pemerintah maupun non pemerintah umumnya hanya sementara, artinya program tersebut akan berjalan selama masih ada anggaran dana, setelah dana habis maka selesai pula kegiatan program. Dengan kata lain bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang selama ini dilaksanakan berdasarkan pada pendekatan proyek dan bukan pendekatan program. Tidak heran jika program pengentasan kemiskinan tidak berkelanjutan, akhirnya angka kemiskinan secara absolut di Indonesia tetap saja tinggi.

Tampaknya dalam merumuskan sebuah kebijakan maupun program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan perlu dilakukan beberapa tahapan kegiatan. Misalnya, diawali dengan assesment, dalam tahap ini dilakukan perumusan atau mengkatagorikan dimensi-dimensi dan faktor penyebab kemiskinan, analisis kebutuhan dan potensi yang dapat dikembangkan dan merumuskan bentuk-bentuk program yang di

inginkan oleh penduduk miskin. Selain itu, dirumuskan pula pihak-pihak yang dapat dilibatkan dalam kegiatan atau program kemiskinan, serta membuat jadwal pelaksanaannya. Setelah tahap ini selesai, maka dilanjutkan ke tahap pelaksanaan kegiatan dan diakhiri dengan tahap monitoring dan evaluasi. Kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan tentunya dalam implementasi melalui program-program yang berbasis pada penggalian potensi yang ada di masyarakat itu sendiri. Artinya perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan program, dan pemerintah berperan sebagai fasilitator. Selain itu perlu juga dirumuskan strategi untuk keberlangsungan program (kegiatan) di masyarakat yang didukung dengan adanya koordinasi antara instansi terkait (Narwati, 2008).

Dalam Islam instrument zakat di jadikan untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Ini berarti, tidak semua orang mampu bergelut dalam kancan ekonomi, karena sebagian mereka ada yang tidak mampu baik fakir maupun miskin. Dengan zakat, orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajiban kepada Allah. Dengan zakat, orang yang tidak mempunyai juga merasa bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat. Orang miskin juga merasa dihargai karena ada empati dari orang yang mampu (Atabik, 2015). Al-Qardhawi dalam Qadir (2001) mengemukakan pandangannya bagi upaya pengentasan kemiskinan melalui enam solusi, yaitu:

1. Setiap orang Islam harus harus bekerja keras dan meningkatkan etos kerja.
2. Orang-orang kaya menyantuni dan menjamin kehidupan ekonomi keluarga dekatnya yang miskin.
3. Meningkatkan dan mengintensifkan pelaksanaan zakat secara profesional.
4. Mengintensifkan pengumpulan bantuan dari sumber, baik dari swadaya masyarakat maupun pemerintah.
5. Mendorong orang-orang kaya untuk mengeluarkan sedekah kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya.
6. Bantuan-bantuan sukarela dan kebaikan hati secara individual dan incidental.

Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Atabik, 2015). Pengentasan kemiskinan melalui proses yang panjang dapat ditempuh melalui pendekatan parsial dan pendekatan struktural. Pendekatan parsial yaitu dengan pemberian bantuan langsung berupa sedekah biasa dari orang-orang kaya dan dari dana zakat secara konsumtif kepada fakir

miskin yang tidak produktif lagi (karena cacat jasmani atau mental). Pendekatan struktural, model pendekatan ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan secara sistematis, dengan cara menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan itu sendiri yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor terpenting pengentasan kemiskinan di kalangan umat Islam khususnya adalah meningkatkan pemahaman zakat guna meningkatkan kesadaran pengalamannya, dan mengintensifkan pelaksanaan dengan sistem pengelolaannya yang baik secara proporsional dan profesional (Qadir, 2001).

Jadi dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan Islam dalam pengentasan kemiskinan yaitu Islam menginginkan agar setiap manusia mempersiapkan kehidupan terbaiknya serta mampu mendayagunakan segala apa yang ada di dalamnya dengan sebaik mungkin. Dengan demikian, manusia pun akan mampu beribadah kepada Allah SWT dengan penuh kekhusyukan dan juga dengan persiapan yang sangat baik dan akan lebih mampu mengkonsentrasikan diri untuk lebih mengenal Allah SWT dan lebih mendekatkan diri kepada-Nya, serta lebih mengenal kehidupan lain kehidupan akhirat yang lebih baik dan lebih kekal.

## 2.2 Pendidikan

Pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Paedagogie*”. Secara Etimologi kata *paedagogie* adalah “*pais*” yang artinya “anak” dan “*again*” yang berarti “bimbing”. Jadi terjemahan bebas

kata peadagogie adalah “bimbingan yang diberikan kepada anka”. Menurut termonologi yang lebih luas pendidikan adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tujuan hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.

Berbicara tentang Pendidikan, Menurut (Ahmad, 2019) bagi bangsa yang ingin maju, pendidikan merupakan sebuah kebutuhan. Sama dengan kebutuhan perumahan, sandang, dan pangan. Bahkan ada bangsa yang terkecil adalah keluarga, pendidikan merupakan kebutuhan utama. Hampir semua jenjang Sekolah Negeri sudah menjadi Lembaga komersialisasi karena tidak lagi berbicara pada persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh kurikulum, tetapi justru besarnya biaya masuk untuk sekolah. Pada kenyataannya, pelaksanaan wajib belajar dihalangi-halangi, karena untuk masuk sekolah kita memerlukan biaya. Bagi masyarakat dan orangtua yang kaya, anaknya akan dapat bersekolah disekolah terbaik, sedangkan yang miskin tidak bersekolah.

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan disuatu Negara adalah tersedianya cukup Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Merujuk pada amanat UUD 1945 beserta amandemennya (pasal 31 ayat 2) yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, maka melalui jalur pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM Penduduk Indonesia.

Peningkatan kualitas Pendidikan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas SDM yang tangguh, dapat bersaing di era globalisasi dan mampu mendongkrak perekonomian berbasis kerakyatan. Peningkatan Kualitas SDM sekarang ini lebih difokuskan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk kelompok usia sekolah (7-24 tahun) untuk mengecap pendidikan (BPS RI,2019).

### **2.2.1 Indikator Pendidikan**

Beberapa macam ukuran yang seringkali digunakan sebagai indikator pendidikan, antara lain, Indikator pendidikan berupa pendidikan tertinggi yang ditamatkan, rata-rata lama sekolah, dan angka melek huruf. Angka Melek Huruf (AMH) menggambarkan persentase penduduk yang mampu membaca dan sekaligus menulis minimal dalam kalimat sederhana yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. AMH diharapkan dapat mengukur seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, sehingga bertambah pengetahuan dan keterampilan mereka, yang pada akhirnya penduduk tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, maupun negaranya di berbagai bidang kehidupan. Untuk itu AMH menjadi salah satu indikator pencapaian target SDGs, yang menjamin bahwa pada tahun 2030 semua remaja dan proporsi kelompok penduduk dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi. (Badan Pusat Statistik, 2018).

Salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial yang merata adalah dengan melihat tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf. Tingkat melek huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Angka Melek Huruf (AMH) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Batas maksimum untuk angka melek huruf, adalah 100 sedangkan batas minimum 0 (standar UNDP). Hal ini menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, dan nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya. Makin rendah persentase penduduk yang melek huruf menunjukkan kegagalan program pendidikan, sebaliknya jika persentase penduduk melek huruf makin tinggi maka mengindikasikan program pendidikan sudah optimal dalam hal mencerdaskan bangsa. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan akan sangat menunjang dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Todaro dan Smith (2006) menyatakan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Yang mana pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Angka melek huruf menggambarkan mutu dari SDM yang ada di suatu wilayah yang diukur dalam aspek pendidikan, karena semakin tinggi angka

kecakapan baca tulis maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas SDM. Dalam penelitian Hermanto dan Dwi (2007) diketahui bahwa pendidikan mempunyai pengaruh paling tinggi terhadap kemiskinan dibandingkan variabel pembangunan lain seperti jumlah penduduk, PDRB, dan tingkat inflasi.

### **2.2.2 Fungsi Pendidikan Dalam Ekonomi**

Tingkat pendidikan merupakan faktor penting yang mempengaruhi distribusi pendapatan dan kemiskinan. Psacharopoulos dalam Kokila (2000), telah menekankan peranan pendidikan di dalam pengurangan ketimpangan dan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan Dejanvry dan Sadoulet dalam Kokila (2000) yang menyatakan bahwa pendidikan mengurangi ketimpangan dan kemiskinan secara langsung, yaitu: dengan meningkatkan produktivitas bagi golongan miskin, memperbaiki kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan dengan upah yang lebih baik, dan membuka jalur hubungan vertikal bagi anak anak mereka. Secara tidak langsung, pendidikan memberikan kemampuan yang lebih bagi golongan miskin untuk memperoleh bagian mereka dari total pendapatan. Beberapa orang masih menyangkal bahwa pendidikan juga merupakan salah satu aspek yang penting dalam kesejahteraan. Pemerintah dapat memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan merancang program-program yang berhubungan dengan pendidikan sedemikian rupa sehingga golongan miskin juga dapat ikut

menikmatinya, karena hal ini juga dapat menurunkan ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Apabila pemerintah kurang mendukung pendidikan dan pelatihan, maka hanya sedikit dari penduduk yang berpendapatan rendah yang mendapat kesempatan untuk meningkatkan pendapatan, atau dengan kata lain meningkatkan tingkat kesejahteraannya. Menurut Gillis (2000) Terdapat dua alasan mengapa pendidikan itu penting:

1. Terdapat banyak permintaan yang tinggi untuk pendidikan, hal ini terjadi karena masyarakat dimana saja percaya bahwa pendidikan dapat memberikan keuntungan bagi diri mereka dan juga anak-anak mereka. Namun di negara-negara berkembang masih banyak yang belum dapat menampung permintaan pendidikan, karena belum banyak terdapat sekolah terutama di pedesaan dan daerah-daerah terpencil lainnya, sehingga masih banyak terdapat penduduk yang belum dapat mengenyam pendidikan.
2. Alasan lainnya adalah karena telah banyak dilakukan observasi yang menyebutkan bahwa dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka pendapatan dan kedudukan sosial seseorang di masyarakat akan dapat terangkat. Walaupun tidak semua orang yang menyelesaikan sekolahnya lebih baik dari yang tidak bersekolah atau menyelesaikan sekolahnya, namun rata-rata mereka yang menyelesaikan sekolahnya menghasilkan pendapatan lebih banyak. Oleh karena itu orang-orang di seluruh dunia

menyadari hal itu sehingga mereka berusaha agar anak-anak mereka nanti mendapatkan pendidikan yang tinggi. Pada negara-negara berkembang kini mulai memperhatikan pentingnya pendidikan karena pendidikan dianggap dapat meningkatkan pembangunan.

### **2.2.3 Pendidikan dalam Perspektif Islam**

Pendidikan dalam Sejarah Islam telah dimulai oleh Rasulullah saw dan para Khulafa ar-Rasyidin. Rasulullah saw telah menjadikan mengajar baca-tulis bagi 10 orang penduduk Madinah sebagai syarat pembebasan bagi setiap tawanan perang Badar. Pada masa itu nabi Muhammad senantiasa menanamkan kesadaran pada sahabat dan pengikutnya akan urgensi ilmu dan selalu mendorong umat untuk senantiasa mencari ilmu. Hal ini dapat kita buktikan dengan adanya banyak hadits yang menjelaskan tentang urgensi dan keutamaan (hikmah) ilmu dan orang yang memiliki pengetahuan. Khalifah Umar bin Khattab, secara khusus, mengirimkan petugas khusus ke berbagai wilayah baru Islam untuk menjadi guru pengajar bagi masyarakat Islam di wilayah-wilayah tersebut. A-Ma'mun, salah satu khalifah Daulat Bani Abbasiyah, mendirikan Bait al-Hikmah di Baghdad pada tahun 815 M, di dalamnya terdapat ruang-ruang kajian, perpustakaan dan laboratorium. Meskipun demikian, Bait al-Hikmah belum dapat dikatakan sebagai sebuah institusi pendidikan yang cukup sempurna, karena sistem pendidikan masih sekedarnya dalam

majlis-majlis kajian dan belum terdapat kurikulum pendidikan yang diberlakukan di dalamnya. Institusi pendidikan Islam yang mulai menggunakan sistem pendidikan modern baru muncul dengan berdirinya Perguruan al-Azhar oleh Daulat Bani Fatimiyyah di Kairo pada tahun 972 M. Pada al-Azhar, selain dilengkapi dengan perpustakaan dan laboratorium, mulai diberlakukan sebuah kurikulum pengajaran. Pada kurikulum al-Azhar diajarkan disiplin-disiplin ilmu agama dan juga disiplin-disiplin ilmu umum. Ilmu agama yang ada dalam kurikulum al-Azhar antara lain tafsir, hadits, fiqh, qira'ah, teologi, sedangkan ilmu akal yang ada dalam kurikulum al-Azhar antara lain filsafat, logika, kedokteran, ma

Cikal bakal ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada manusia pertama dari Sang Pemilik Ilmu. Selain kepada nabi Adam AS., Allah SWT juga memberikan hikmah (kenabian, kesempurnaan ilmu dan ketelitian amal perbuatan) kepada para nabi dan rasulnya. Kepada sebagian rasul pula, Allah menurunkan kitab suci sebagai sumber ilmu pengetahuan. Firman Allah Al-Baqarah Ayat 31:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ

أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾

Artinya: "Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara

*kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui". (QS. Al-Baqarah[2]:31).*

Dalam beberapa ayat-Nya pula, Allah memberi tempat yang istimewa kepada muslim yang memiliki ilmu. Sebagai Sang Pemilik, ilmu Allah sangat luas, mencakup bumi dan langit. Sebagian ilmu-Nya diwahyukan melalui para rasulnya dalam bentuk ayat-ayat qauliyah. Sebagian lainnya, Allah menggambarannya dalam bentuk ayat-ayat kauniyah (mis: kejadian alam, penyebab bencana, asal kehidupan manusia, dll). Ibn Taimiyah menyatakan bahwa ilmu itu adalah yang bersandar pada dalil, dan yang bermanfaat darinya adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah.

Sistem pendidikan dalam Islam didasarkan pada sebuah kesadaran bahwa setiap Muslim wajib menuntut ilmu dan tidak boleh mengabaikannya. Banyak nash al-Qur'an maupun hadits Nabi yang menyebutkan juga keutamaan mencari ilmu dan orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya motivasi seorang Muslim untuk mencari ilmu adalah dorongan ruhiyah, bukan untuk mengejar faktor duniawi semata. Seorang Muslim yang giat belajar karena terdorong oleh keimanannya, bahwa Allah Swt sangat cinta dan memuliakan orang-orang yang mencari ilmu dan berilmu di dunia dan di akhirat. Betapa pentingnya pendidikan, karena hanya dengan proses pendidikanlah manusia dapat mempertahankan

eksistensinya sebagai manusia yang mulia, melalui pemberdayaan potensi dasar dan karunia yang telah diberikan Allah. Apabila semua itu dilupakan dengan mengabaikan pendidikan, manusia akan kehilangan jati dirinya.

Pendidikan Islam menghendaki kesempurnaan kehidupan yang tuntas sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Baqarah Ayat 208:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا  
تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-Baqarah[2]:208).

Pentingnya pendidikan telah dicontohkan oleh Allah pada wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq Ayat 1-5 yang banyak mengandung isyarat-isyarat pendidikan dan pengajaran dengan makna luas dan mendalam.

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾  
أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ  
مَا لَمْ يَعْزَمْ ﴿٥﴾

Artinya: “(1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan (2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (3) Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah (4) Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam (5) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”. (Al-Alaq [97]:1-5).

Perilaku Nabi Muhammad saw sendiri selama hayatnya penuh dengan nilai-nilai pendidikan yang tinggi, seperti firman Allah QS.Al-Ahzab Ayat 21 :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا  
 اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.

### 2.3 Studi Literatur Tentang Perkawinan Usia Dini

Perkawinan merupakan fitrah manusia, dan setiap orang normal pasti akan menjalaninya, karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan. Ada pria ada wanita, agar manusia dapat mengembangkan dan meneruskan keturunannya. Perkawinan dalam istilah agama ialah: Melakukan

suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar suka rela dan kerindhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman, dengan cara yang di rindhoi oleh Allah SWT.

Perkawinan usia dini merupakan perkawinan remaja dilihat dari segi umur masih belum cukup atau belum matang dimana di dalam UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 71 yang menetapkan batas maksimum pernikahan di usia muda adalah perempuan umur 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun itu baru sudah boleh menikah. Dari segi kesehatan, perkawinan usia muda itu sendiri yang ideal adalah untuk perempuan di atas 20 tahun sudah boleh menikah, sebab perempuan yang menikah di bawah umur 20 tahun berisiko terkena kanker leher rahim, dan pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang, maka kalau terpapar Human Papiloma Virus (HPV) pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker (Kampono, 2007).

Oleh Pemerintah perkawinan di atur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Undang-Undang Perkawinan (UUP). Menurut pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 seorang dapat menikah adalah harus memenuhi syarat, adalah pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Oleh karena apabila ada orang yang belum berumur 19 tahun (laki-laki) dan 16 tahun (perempuan) maka harus meminta

dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh kedua orang tua pihak laki-laki dan perempuan. Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa, setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin pria yang belum berusia 19 tahun atau wanitanya belum berusia 16 tahun disebut sebagai perkawinan dibawah umur. Bagi perkawinan di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, hakikatnya disebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam pasal 81 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002, “ bahwa perkawinan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun di kategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan”, apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur.

Perkawinan yang terjadi pada masyarakat pedesaan, masih banyak yang dibawah umur, yaitu dibawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan di bawah 16 tahun bagi perempuan. Perkawinan di bawah umur yang terjadi dipedesaan adalah hal yang biasa terjadi. Hal itu disebabkan oleh budaya masyarakat pedesaan yang takut tidak laku sehingga tidak dilamar pada usia dibawah 16 tahun sehingga orang tua mau menerimanya.

Di samping itu pendidikan masyarakat pedesaan sebagian rendah, hal ini mengakibatkan kurangnya pengetahuan mengenai pengaruh dari perkawinan di bawah umur, pengaruh tersebut antara lain sering terjadi perceraian secara psikologis belum dewasa dalam arti psikologisnya belum matang sehingga belum stabil, dalam

kehidupan keluarga kebutuhannya kurang, karena mereka tidak mempunyai pengetahuan yang cukup, sehingga apabila muncul permasalahan dalam keluarga, seperti permasalahan ekonomi, hubungan antara suami istri, mereka tidak mampu mengatasinya, yang dapat menimbulkan masalah yang sulit untuk diselesaikan dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur mempunyai pengaruh yang luas terhadap keluarga, seperti pengaruh perilaku pasangan suami istri, keluarga, ekonomi, dan sosial. Pada saat ini anak sudah banyak yang melakukan pernikahan di usia dini. Semestinya para anak-anak itu harus berfikir dua kali sebelum mengambil keputusan untuk menikah di usia dini. Pada umumnya anak yang menikah di usia dini, pasti tidak dapat menikmati bangku pendidikan dan masa-masa remajanya yang seharusnya dinikmati oleh mereka. Kebanyakan anak yang melakukan pernikahan dini adalah anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah.

Tujuan perkawinan menurut Islam dalam (Soemati, 1986) adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia atas dasar cinta kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariah. Sedangkan menurut filosof Islam (Soemiyati, 1986) membagi tujuan perkawinan ada lima yaitu:

- a. Keturunan yang sah akan melangsungkan keturunan sertamemperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama darimasyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencapai rezeki penghidupanyang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab (Hanam Ghozalidalam soemiyati, 1968: 12-13) Dari uraian di atas maka tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga bahagia, memperoleh keturunan yang sah, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan memenuhi tuntutan naluri hidup manusia.

### **2.3.1 Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Dini**

Di berbagai penjuru dunia, pernikahan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi, yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib pada kalangan tertentu, meningkatkan pula angka kejadian pernikahan anak. Motif ekonomi, harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua menyetujui pernikahan usia dini. Alasan orangtua menyetujui pernikahan anak ini seringkali dilandasi pula oleh ketakutan akan

terjadinya kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas atau untuk mempererat tali kekeluargaan. Secara umum, pernikahan anak lebih sering dijumpai di kalangan keluarga miskin, meskipun terjadi pula di kalangan keluarga ekonomi atas. Di banyak negara, pernikahan anak seringkali terkait dengan kemiskinan. Negara dengan kasus pernikahan anak, pada umumnya mempunyai produk domestik bruto yang rendah. Pernikahan anak membuat keluarga, masyarakat, bahkan negara mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan hal ini tentunya menyebabkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan yang rendah baik anak maupun keluarga dan lingkungannya (Sari, 2009).

Penyebab pernikahan dini dipengaruhi juga oleh berbagai macam faktor. Diantaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan mereka yang mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti hakikat dan tujuan pernikahan. Faktor ekonomi keluarga atau lingkungan tempat mereka tinggal juga bisa penyebab pernikahan dini, dan juga bisa perjudohan juga sering terjadi akibat putus sekolah selain itu pernikahan dini juga bisa terjadi karena keinginan mereka sendiri yang kedua pasangan saling mencintai tetapi untuk menikah umurnya belum bisa untuk menikah. Dampak pernikahan dini akan menimbulkan dampak persoalan dalam rumah tangga, seperti pertengkaran, percecokan dan bentrokan antara suami-istri, emosi yang belum stabil memungkinkan banyaknya pertengkaran, dan akhirnya akan berkelanjutan dengan perceraian.

### 2.3.2 Perkawinan Dini dalam Perspektif Islam

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rah mat bagi seluruh manusia di alam ini. Termasuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mengupas masalah pernikahan, karena pada prinsipnya semua perbuatan orang muslim yang sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara' sebagaimana dirumuskan dalam hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan Al-qur'an Surat An-Nisa' Ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ  
 مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا  
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”* (QS. An-Nisa' [4]:3)

Perintah untuk menikah pada ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan pernikahan namun tuntutan tersebut

bersifat sunnah, bukan sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim. Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah atau mandub, demikian menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi yang Artinya: *“Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Satu hal yang perlu digaris bawahi dari hadits di atas adalah perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk menikah. Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu:

- a. Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hokum-hukum fikih yang ada hubungannya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti khitbah (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti hu kum menafkahi keluarga, thalak, rujuk. Syarat pertama ini didasarkan pada

prinsip bahwa fardu 'ain hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari hari yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya;

- b. Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud dengan harta di sini ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok (al-hajat al-asasiyyah) bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak (bil ma'ruf);
- c. Kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai suami, tidak impoten. Khalifah Umar bin al-Khattab pernah memberi penangguhan selama satu tahun kepada seorang laki-laki (suami) yang impoten untuk berobat. Ini menunjukkan bahwa kesiapan "fisik" yang satu ini perlu mendapat perhatian serius. Sekalipun dikatakan bahwa pernikahan dini hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam, tetapi tidak berarti ia di bolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah pada usia dini. terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan dini agar tidak mengakibatkan efek negatif sebagaimana dilansir oleh banyak kalangan yang mayoritas berpandangan bahwa pernikahan dini selalu berkonotasi

tidak baik. Pertama, perempuan harus sudah siap secara fisik, karena banyak perempuan yang sudah baligh namun belum siap untuk menikah karena kondisi tubuhnya yang lemah atau penyakit yang membuatnya tidak memiliki fisik yang prima sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai istri. Kedua, perempuan tersebut sudah matang secara mental dan terdidik untuk dapat memenuhi tanggung jawab. Ini bukan berarti ia harus mengetahui seluk beluk kehidupan berumah tangga secara sempurna ketika berinteraksi dengan suami, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Kedua hal tersebut pantas mendapat perhatian lebih berdasar hadis Nabi bah wa beliau tidak menyuruh menikah kepa da seluruh pemuda tanpa terkecuali bagi mereka yang dianggap mempunyai al-bâ'ah, yaitu kemampuan memberi nafkah. Ketiga, pada pernikahan perempuan yang masih sangat belia, lebih utama kalau dia dan calon suaminya tidak terpaut jauh usianya, kecuali untuk maksud yang dibenarkan. Imam An-Nasa'i telah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam Sunan-nya, demikian pula Ibnu Hibban di dalam Shahihnya, serta AlHakim di dalam Al-Mustadraknya, dan iamenilai shahih riwayat tersebut berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim yang disepakati oleh Adz-Dzahabi dari Buraidah, menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar melamar Fathimah, namun Rasulullah saw kemudian menikahkan

Fathimah dengan Ali. Dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa usia calon suami perlu diperhatikan, yaitu sebaiknya tidak jauh dengan usia perempuan. Karena kedekatan jarak usia ini di harapkan akan lebih dapat melahirkan ke serasian diantara pasangan suami istri, dan lebih dapat melanggengkan pernikahan mereka.

## **2.4 Keterkaitan Antar Variabel**

### **2.4.1 Hubungan Antara Pendidikan terhadap Kemiskinan**

Hubungan antara pendidikan terhadap kemiskinan ialah pendidikan dapat mengurangi ketimpangan dan kemiskinan secara langsung, yaitu: dengan meningkatkan produktivitas bagi golongan miskin, memperbaiki kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan dengan upah yang lebih baik, dan membuka jalur hubungan vertikal bagi anak anak mereka. Secara tidak langsung, pendidikan memberikan kemampuan yang lebih bagi golongan miskin untuk memperoleh bagian mereka dari total pendapatan. Karna pada saat masuk kerja harus memiliki kemampuan baik skill pengalaman dan juga ilmu pengetahuan yang luas agar dapat mengembangkan potensi sumber daya manusia.

Todaro (1994) menyatakan bahwa selama beberapa tahun, sebagian besar penelitian dibidang ilmu ekonomi, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara sedang berkembang, menitik beratkan pada keterkaitan antara pendidikan, produktifitas tenaga

kerja, dan tingkat output. Hal ini tidak mengherankan karena, sasaran utama pembangunan di tahun 1950-an dan 1960-an adalah memaksimalkan tingkat pertumbuhan output total. Akibatnya, dampak pendidikan atas distribusi pendapatan dan usaha menghilangkan kemiskinan absolut sebagian besar telah dilupakan. Selanjutnya Todaro (2000) menyatakan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Yang mana pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Gaiha (1993) menjelaskan bahwa pendidikan berperan penting dalam kesejahteraan seseorang dengan berbagai cara yang berbeda. Pendidikan dapat meningkatkan kemampuan penduduk untuk memperoleh dan menggunakan informasi, memperdalam pemahaman akan perekonomian, memperluas produktifitas, dan memberi pilihan kepada penduduk apakah berperan sebagai konsumen, produsen atau warganegara. Selain itu pendidikan dan distribusi pendapatan adalah mempunyai korelasi yang positif dengan penghasilannya selama hidup seseorang. Korelasi ini dapat dilihat terutama pada seseorang yang dapat menyelesaikan sekolah tingkat lanjutan dan universitas, akan mempunyai perbedaan pendapatan 300 persen sampai dengan 800 persen, dengan tenaga kerja yang hanya menyelesaikan sebagian ataupun seluruh pendidikan tingkat sekolah dasar. Karena tingkat penghasilan

sangat dipengaruhi oleh lamanya tahun memperoleh pendidikan, jelas ketimpangan pendapatan yang besar tersebut akan semakin besar.

Menurut Simmons (dikutip dari Todaro dan Smith, 2006), pendidikan merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Selanjutnya Todaro dan Smith (2006) menyatakan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Yang mana pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Dalam penelitian Hermanto dan Dwi (2007) diketahui bahwa pendidikan mempunyai pengaruh paling tinggi terhadap kemiskinan dibandingkan variabel pembangunan lain seperti jumlah penduduk, PDRB, dan tingkat inflasi.

#### **2.4.2 Hubungan Antara Perkawinan Usia Dini terhadap Kemiskinan**

Di samping pendidikan yang berhubungan dengan kemiskinan, perkawinan juga berpengaruh terhadap kemiskinan karna masyarakat pedesaan yang rendah pendidikan, hal ini mengakibatkan kurangnya pengetahuan mengenai pengaruh dari perkawinan di bawah umur, pengaruh tersebut antara lain sering terjadi perceraian secara psikologis belum dewasa dalam arti psikologisnya belum matang sehingga belum stabil, dalam

kehidupan keluarga kebutuhannya kurang, karena mereka tidak mempunyai pengetahuan yang cukup, sehingga apabila muncul permasalahan dalam keluarga, seperti permasalahan ekonomi, hubungan antara suami istri, mereka tidak mampu mengatasinya, yang dapat menimbulkan masalah yang sulit untuk diselesaikan dari uraian tersebut dapat di simpulkan bahwa perkawinan di bawah umur mempunyai pengaruh yang luas terhadap keluarga, seperti pengaruh perilaku pasangan suami istri, keluarga, ekonomi, dan sosial. Pada saat ini anak sudah banyak yang melakukan pernikahan di usia dini. Semestinya para anak-anak itu harus berfikir dua kali sebelum mengambil keputusan untuk menikah di usia dini. Pada umumnya anak yang menikah di usiadini, pasti tidak dapat menikmati bangku pendidikan dan masa-masa remajanya yang seharusnya dinikmati oleh mereka. Kebanyakan anak yang melakukan pernikahan dini adalah anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah.

Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang wanita dapat mendorong untuk cepat menikah. Permasalahan yang terjadi karena mereka tidak mengetahui seluk beluk perkawinan sehingga cenderung untuk cepat berkeluarga dan melahirkan anak. Menurut Sekarningrum yang dikutip oleh Badan Kesejahteraan dan Keluarga Berencana p), suatu masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah akan cenderung untuk mengawinkan anaknya pada usia masih muda. Tingkat pendidikan yang rendah juga mengakibatkan masyarakat

sulit memperoleh pekerjaan layak sehingga orang tua lebih memilih untuk menikahkan anaknya daripada menambah beban hidup keluarga

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan pengaruh Pendidikan dan Tingkat Perkawinan Usia Dini Terhadap Kemiskinan, pertama penelitian dari Sunusi, dkk, (2014) melakukan penelitian dengan judul Analisis pengaruh jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan, pengeluaran pemerintah pada pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara tahun 2001-2010. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan, pengeluaran pemerintah pada pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah serta kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian kedua dari Kurniawati, dkk, (2017) melakukan penelitian dengan judul Hubungan antara tingkat pendidikan, status pekerjaan dan tingkat pendapatan dengan usia perkawinan dini wanita di kelurahan kotalama kecamatan kedungkandang kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan tingkat pendapatan

dengan usia perkawinan dini wanita. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan dengan usia perkawinan dini wanita, dan tidak ada hubungan yang signifikan antara status pekerjaan dengan usia perkawinan dini wanita.

Selain itu ada juga penelitian yang ketiga dari Wijayanto (2010) dengan judul Analisis pengaruh pdrb, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di kabupaten / kota Jawa Tengah tahun 2005 – 2008. Penelitian ini bertujuan untuk mengateahui bagaimana dan seberapa besar pengaruh variabel PDRB, Pendidikan (melek huruf), pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah sehingga nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam penentuan kebijakan dalam mengatasi masalah kemiskinan di Jawa Tengah. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel pendidikan yang diproksi dengan angka melek huruf berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel pengangguran berpengaruh negatif serta signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

Adapun penelitian yang keempat dari Khalil, dkk (2018) melakukan penelitian dengan judul Telaah Social Capital Pada Wilayah Perbatasan Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui modal sosial yang mana mampu memperkuat dimensi perekonomian di Kabupaten Aceh

Tamiang. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel modal sosial yang mampu memperkuat dimensi perekonomian di Kabupaten Aceh Tamiang adalah akses pendidikan, jumlah Ormas, Beban ketergantungan masyarakat. Model pemberdayaan ekonomi dalam konteks sosial capital antara lain (1) Model Pendapatan:Peningkatan jumlah ormas dan mengurangi beban ketergantungan. (2) Model konsumsi: Peningkatan akses pendidikan dan jumlah Ormas. (3) Model Investasi: Kurangi beban ketergantungan dan jumlah Ormas. (4) Model Zakat: tingkatkan akses pendidikan dan jumlah Ormas, jadi variabel modal sosial di Kabupaten Aceh Tamiang secara spesifik mampu memperkuat penerimaan zakat dengan adanya determinan yang kuat antara pendidikan dan lembaga keorganisasian masyarakat terhadap penerimaan zakat.

Penelitian yang terakhir bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, pengeluaran perkapita dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk dapat menurunkan tingkat kemiskinan, walaupun dengan pengaruh yang sangat kecil (0,000023%) terhadap tingkat kemiskinan, pemerintah tetap harus waspada dalam mengendalikan jumlah penduduk serta terus meningkatkan kualitas hidup penduduk dan kesejahteraan materiil, agar dapat dijadikan modal untuk memacu pembangunan

ekonomi dan menjadikan jumlah penduduk yang besar bukan sebagai beban pembangunan.l

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Judul Penelitian dan Penulis	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Analisis pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, pengeluaran perkapita dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah (Merna Kumalasari, 2010)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Angka harapan hidup</li> <li>• Angka melek huruf</li> <li>• Rata-rata lama sekolah</li> <li>• Pengeluaran perkapita dan</li> <li>• Jumlah Penduduk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regresi linier Berganda</li> <li>• Dummy wilayah</li> </ul>	Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa variabel Angka Harapan Hidup (HH), Pengeluaran Perkapita disesuaikan (PP) dan Jumlah Penduduk (JP) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.
2.	Analisis pengaruh PDRB, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di kabupaten / kota Jawa Tengah tahun 2005 – 2008 (Wijayanto, 2010).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produk Domestik Regional Bruto</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Pengangguran</li> <li>• Kemiskinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regresi linier panel</li> <li>• FEM</li> </ul>	PDRB berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel pendidikan yang diproksi dengan angka melek huruf berpengaruh negatif serta signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel

Tabel 2.1-Lanjutan

No.	Judul Penelitian dan Penulis	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				pengangguran berpengaruh negatif serta signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.
3.	Analisis pengaruh jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan, pengeluaran pemerintah pada pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara tahun 2001-2010 (Sunusi, Dkk, 2014).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Tenaga Kerja</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Pengeluaran Pemerintah</li> <li>• Kemiskinan</li> </ul>	<i>Analisis Path</i>	Tenaga kerja, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah serta kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Utara.
4.	Hubungan antara tingkat pendidikan, status pekerjaan dan tingkat pendapatan dengan usia perkawinan dini wanita di Kelurahan skotalama kecamatan kedungkandang kota malang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat Pendidikan</li> <li>• tatus Pekerjaan</li> <li>• Tingkat Pendapatan</li> <li>• Usia Perkawinan Dini</li> </ul>	<i>Explanatory, crosssectional study</i>	Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan, Tingkat Pendapatan, dan Usia Perkawinan Dini Wanita memiliki hubungan yang signifikan

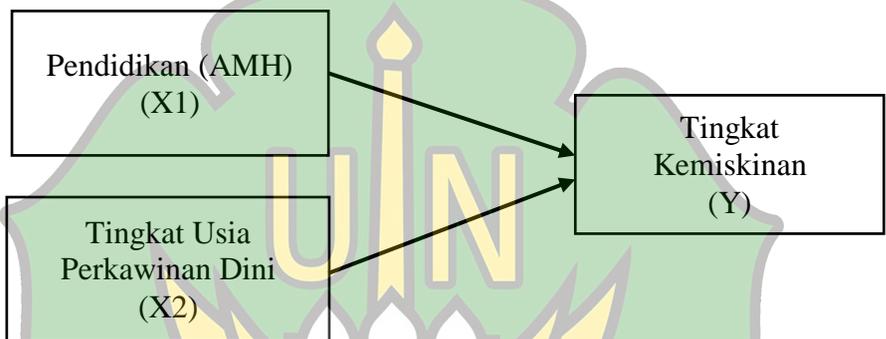
Tabel 2.1-Lanjutan

No .	Judul Penelitian dan Penulis	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	(Kurniawati, Dkk, 2017).			
5.	Telaah Sosial Capital Pada Wilayah Perbatasan Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh (Khalil, Dkk, 2018)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisasi Sosial</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Indeks Beban Ketergantungan</li> <li>• Modal sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eksploratif</li> <li>• Deskriptif</li> </ul>	<p>Variabel modal sosial yang mampu memperkuat dimensi perekonomian di Kabupaten Aceh Tamiang adalah akses pendidikan, jumlah Ormas, Beban ketergantungan masyarakat. Model pemberdayaan ekonomi dalam konteks sosial capital antara lain (1)Model Pendapatan:Peningkatan jumlah ormas dan mengurangi beban ketergantungan. (2)Model konsumsi: Peningkatan akses pendidikan dan jumlah Ormas. (3)Model Investasi : Kurangi beban ketergantungan dan jumlah Ormas. (4)Model Zakat: tingkatan akses pendidikan dan jumlah Ormas.</p>

## 2.6 Kerangka Penelitian

Penelitian ini ingin menganalisis Pengaruh Pendidikan dan Tingkat Usia Perkawinan Dini terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015-2019. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian sebagai berikut:

**Gambar 2. 1 Skema Pemikiran**



Sumber: Dari pengembangan peneliti berdasarkan penelitian terdahulu (2019)

## 2.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, temuan penelitian terkait dan kerangka penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi hipotesis penelitian ini adalah:

- $H_{01}$  : Tidak ada pengaruh Pendidikan (AMH) secara parsial terhadap kemiskinan di Indonesia.
- $H_{a1}$  : Pendidikan (AMH) secara parsial berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia.
- $H_{02}$  : Tidak ada pengaruh Perkawinan Usia Dini secara parsial terhadap kemiskinan di Indonesia

- $H_{a_2}$  : Perkawinan Usia Dini secara persial berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia
- $H_{0_3}$  : Tidak ada pengaruh Pendidikan (AMH) dan Perkawinan Usia Dini secara simultan terhadap kemiskinan di Indonesia.
- $H_{a_3}$  : Pendidikan (AMH) dan Perkawinan Usia Dini secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia.



## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang tergolong dalam penelitian eksplanasi yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel yang diteliti melalui pengujian hipotesis (Anshori & Iswati, 2009) penelitian ini menekankan analisisnya pada data numerik atau angka yang diperoleh dengan metode statistika serta dilakukan pada penelitian inferensial atau dalam rangka pengujian hipotesis sehingga diperoleh pengaruh sebab dan akibat antara variabel penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data panel berupa lima tahun berturut dengan 34 provinsi di Indonesia.

### **3.2 Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan berbentuk data panel yaitu gabungan antara data runtut waktu (time series) dan data silang (cross section), yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2013). Data sekunder dengan kata lain merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah dikumpulkan dari sumber lain dan diperoleh dari pihak lain seperti buku-buku literatur, catatan-catatan, data hasil publikasi

pemerintah seperti laporan dari BPS atau sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data yang digunakan berbentuk data panel bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Periode data yang digunakan yaitu tahun 2015-2019 dengan 34 Provinsi. Jadi total observasi 170 data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data BPS tahun 2015 sampai 2019 yaitu, data Pendidikan indikator Angka Melek Huruf di Indonesia tahun 2015 sampai 2019, data Tingkat Perkawinan Usia Dini tahun 2015 sampai 2019 dan data Persentase Kemiskinan di Indonesia tahun 2015 samapi 2019 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS Indonesia).

### 3.3 Operasional Variable

Dalam penelitian ini variabel-variabel yang digunakan yaitu Persentase Kemiskinan (Y), Pendidikan Angka Melek Huruf ( $X_1$ ) dan Tingkat Perkawinan Usia Dini ( $X_2$ ) Untuk memahami setiap variabel yang digunakan, maka diberikan definisi variabel sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Notasi	Deskripsi
Kemiskinan	Y	Persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 2015-2019.
Pendidikan	$X_1$	Persentase Angka Melek Huruf (AMH) di Indonesia tahun 2015-2019.
Usia Perkawinan Dini	$X_2$	Jumlah Perkawinan Usia Dini di Indonesia tahun 2015-2019.

### 3.4 Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) yang pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi atau melihat pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Model dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \varepsilon \dots\dots\dots (3.1)$$

Bentuk persamaan lainnya :

$$\text{Kemiskinan}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Pendidikan}_{it} + \beta_2 \text{Perkawinan Usia Dini}_{it} + \varepsilon \dots\dots (3.2)$$

Di mana:

- Y : Kemiskinan (%)  
 $\alpha$  : *Intercept* (konstanta)  
 $X_1$  : Pendidikan (%)  
 $X_2$  : Tingkat Usia Perkawinan Dini (%)  
 $\beta_1, \beta_2$  : Koefisien regresi  
 $\varepsilon$  : Besaran nilai residual (*standar error*)  
*i* : Cross section (wilayah)  
*t* : Time series ( Waktu)

### 3.5 Teknik Analisis Data

Jenis data dan hipotesis sangat menentukan dalam ketepatan pemilihan statistik alat uji. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan tahapan analisis sebagai berikut :

1. Melakukan pemilihan model estimasi dengan melakukan pengujian *Chow-test*, dan *Housman-test*.

2. Melakukan uji hipotesis yaitu analisis regresi linier berganda, yang harus memenuhi kriteria yaitu, uji F-test dan uji T-test.

### 3.5.1 Penentuan Model Estimasi

Penelitian yang menggunakan jenis data panel memiliki tiga jenis model regresi yang berbeda, yaitu:

1. *Common Effect Model* atau *Pooled Least Square* (PLS).

*Common Effect Model* merupakan model sederhana yang menggabungkan antara data time series dan cross section. *Common effect* tidak memperhatikan dimensi waktu dan individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Dapat dikatakan model ini merupakan model yang sederhana dibandingkan dengan model Fixed Effect Model.

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 X_{it} + \beta_2 X_{it} + \dots + \epsilon_{it} + \mu_{it} \quad (3.3)$$

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Fixed Effect Model mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model Fixed Effect menggunakan teknik variabel dummy. Pendugaan parameter regresi panel dengan Fixed Effect Model menggunakan teknik penambahan variabel dummy sehingga metode ini seringkali disebut dengan Least Square

*Dummy Variable* model. Gujarati (2004) mengatakan bahwa pada *Fixed Effect Model* diasumsikan bahwa koefisien slope bernilai konstan tetapi intercept bersifat tidak konstan.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \beta_2 X_{it} + \beta_3 D_{1i} + \beta_4 D_{2i} + \dots + \varepsilon_{it} + \mu_{it} \dots (3.4)$$

3. *Random Effect Model* atau teknik *Generalized Least Square* (GLS).

*Random Effect Model* mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar variabel dan antar individu. Pada model *Random Effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh *error terms* masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model *Random Effect* yaitu dapat menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model*.

A R - R A N I R Y

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \dots + \varepsilon_{it} + \mu_{it} \dots (3.5)$$

### 3.5.2 Tahapan Pengujian Model

Penentuan model estimasi dapat dilakukan dengan 3 uji yang berbeda yaitu *Chow-test*, *Housman-test*, dan *Lagrange Multiplier-test* yang mana masing-masing uji tersebut membantu

untuk memilih diantara *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Model manakah yang sebaiknya digunakan:

### 1. *Chow-test*

Uji Chow disebut juga sebagai uji *Redudant Fix Effect* atau *Likelihood Ration*. Uji ini dilakukan untuk menentukan diantara *Common Effect Model* dan *Fix Effect*, model terbaik manakah yang dapat digunakan. Hipotesis dari uji Chow adalah jika  $H_0$  diterima maka model yang dipilih adalah *Common Effect* sebaliknya jika  $H_a$  yang diterima dan  $H_0$  ditolak maka model yang dipilih atau model yang terbaik untuk digunakan adalah *Fix effect Model*. Apabila pvalue lebih kecil dari nilai signifikan ( $p > \alpha$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima sebaliknya jika p-value lebih besar dari nilai signifikan ( $p > \alpha$ ) maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Jika hasil dari uji Chow menemukan bahwa model yang sebaliknya digunakan adalah model *Common Effect* maka tahap selanjutnya adalah melakukan uji Lagrange Multiplier sebaiknya jika hasil *Fix Effect Model* maka tahap selanjutnya adalah melakukan uji Hausman.

### 2. *Housman-test*

Uji Housman dilakukan untuk menentukan diantara *Fix Effect Model* dan *Random Effect Model* manakah yang lebih baik untuk digunakan. Hipotesis dari uji Housman adalah jika  $H_0$  diterima maka model yang dipilih adalah

*Random Effect* sebaliknya jika  $H_a$  yang diterima dan  $H_0$  yang diterima maka model yang pilih atau model yang terbaik digunakan adalah *Fix Effect Model*. Apabila p-value lebih kecil dari nilai signifikan ( $p < \alpha$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima sebaliknya jika p-value lebih besar dari nilai signifikan ( $p > \alpha$ ) maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Jika hasil dari uji Housman adalah *Fix Effect Model* maka tidak perlu dilanjutkan dengan uji *Lagrange multiplier* namun, sebaliknya jika hasilnya adalah *Random Effect* maka dilanjutkan dengan uji *Lagrange Multiplier*.

### 3. *Lagrange Multiplier-test*

Uji *Lagrange Multiplier* adalah pengujian yang dilakukan untuk memilih antara model *Common Effect* dan *Random Effect Model*. Hipotesis dari uji *Lagrange Multiplier* adalah jika  $H_0$  diterima maka model yang dipilih adalah *Common Effect* sebaliknya jika  $H_a$  yang diterima dan  $H_0$  yang ditolak maka model yang dipilih atau model terbaik untuk digunakan adalah *Random Effect*. Apabila p-value lebih kecil dari nilai signifikan ( $p < \alpha$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  sebaliknya jika p-value lebih besar dari nilai signifikan ( $p > \alpha$ ) maka  $H_a$  maka ditolak dan  $H_0$  diterima. Jika hasil uji ini adalah *Common Effect Model* maka model yang sebaiknya digunakan adalah *Common Effect* sebaliknya jika hasil yang dipilih adalah *Random Effect Model* maka model yang sebaiknya digunakan adalah *Random effect*.

### 3.6 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasi). Perhitungan statistik disebut dengan signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (dimana  $H_0$  ditolak). Sebaiknya disebut signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah  $H_0$  diterima (Priyatno, 2010: 9). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu:

1. Uji simultan (Uji F)

Uji-F digunakan untuk melakukan uji hipotesis koefisien (*slope*) regresi secara bersamaan, dengan kata lain digunakan untuk memastikan bahwa model yang dipilih layak atau tidak untuk menginterpretasikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kriteria Uji-F yaitu, jika *P-value* dan *F-Statistics* lebih besar dari  $\alpha$ , berarti variabel bebas tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat, sedangkan apabila *P-value* dan *F-Statistics* lebih kecil dari  $\alpha$ , berarti variabel bebas signifikan mempengaruhi variabel terikat.

Pengujian hipotesis pada uji F dapat diketahui dengan membandingkan antara  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  sebagai berikut:

- a.  $H_0: \beta_1 = \beta_2 = 0$ , tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel-variabel X secara bersama-sama terhadap Y
- b.  $H_a$ : minimal  $\beta_i \neq 0$ , setidaknya ada 1 variabel bebas X yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Y dimana  $i = 1, 2$ ,

Kriteria Uji F adalah:

- a. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka tidak dapat menolak  $H_0$  (keseluruhan variabel bebas X tidak berpengaruh terhadap variabel terikat Y).
- b. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak (setidaknya ada 1 variabel bebas X yang berpengaruh terhadap variabel terikat Y).

## 2. Uji Parsial (Uji T)

Uji-t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individu. Pengujian dilakukan terhadap koefisien regresi populasi, apakah sama dengan nol, yang artinya variabel bebas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, atau tidak sama dengan nol, yang artinya variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

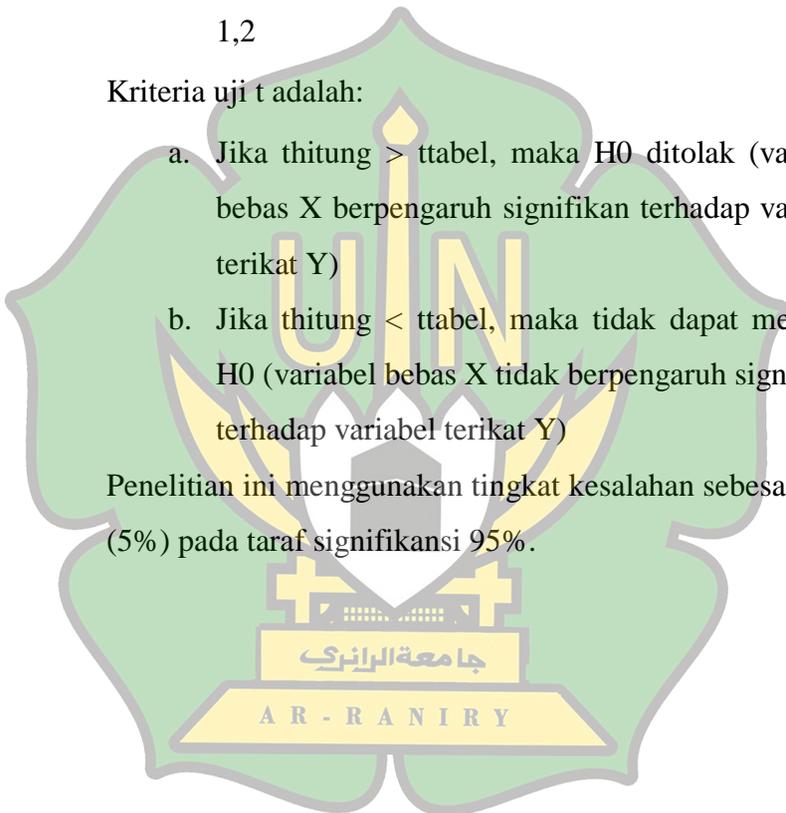
Uji hipotesis dapat diketahui dengan membandingkan antara  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  sebagai berikut:

- a.  $H_0: \beta_i = 0$ , artinya masing-masing variabel  $X_i$  tidak memiliki pengaruh terhadap variabel  $Y$ , dimana  $i = 1, 2$
- b.  $H_a: \beta_i \neq 0$ . Artinya masing-masing variabel  $X_i$  memiliki pengaruh terhadap variabel  $Y$ , dimana  $i = 1, 2$

Kriteria uji t adalah:

- a. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak (variabel bebas  $X$  berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat  $Y$ )
- b. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka tidak dapat menolak  $H_0$  (variabel bebas  $X$  tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat  $Y$ )

Penelitian ini menggunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05 (5%) pada taraf signifikansi 95%.



## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan suatu data. Sehingga dapat memberikan informasi yang berguna dan hanya bisa memberikan gambaran dari suatu sampel. Pada bab ini akan membahas tentang karakteristik dari kemiskinan, pendidikan dan perkawinan usia dini. Hasil analisis statistik deskriptif yang diperoleh pada penelitian ini dipaparkan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4. 1**  
**Hasil Analisis Statistik Deksriptif**

	<b>Kemiskinan</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Pernikahan Dini</b>
<i>Mean</i>	11.02047	94.57459	12.34288
<i>Median</i>	9.375000	96.87000	12.77500
<i>Maximum</i>	28.47000	99.92000	23.19000
<i>Minimum</i>	3.330000	64.60000	2.210000
<i>Std. Dev.</i>	5.908073	5.921704	4.755356
<i>Skewness</i>	1.018637	-2.643446	-0.104781
<i>Kurtosis</i>	3.540667	11.92467	2.433956
<i>Jarque-Bera</i>	31.46989	762.1735	2.580617
<i>Probability</i>	0.000000	0.000000	0.275186
<i>Sum</i>	1873.480	16077.68	2098.290
<i>Sum Sq. Dev.</i>	5899.000	5926.251	3821.666
<i>Observations</i>	170	170	170

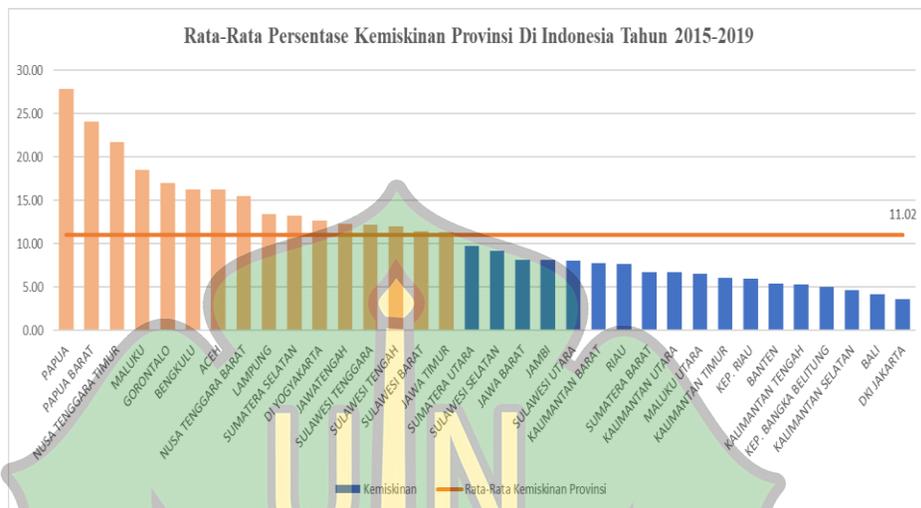
Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan perhitungan yang dihasilkan pada tabel 4.1 maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **4.1.1 Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan variabel dependen pada penelitian ini yang dihitung berdasarkan tingkat persentase kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Tolak ukur dari kemiskinan yaitu berdasarkan standar hidup masyarakat di suatu wilayah. Tingkat kemiskinan yang menjadi suatu masalah global di setiap negara. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi di dunia. Berdasarkan tabel 4.1 dari 170 sampel diperoleh nilai rata-rata (mean) kemiskinan adalah sebesar 11.02 dan kemiskinan tertinggi adalah 28.47 di tahun 2016 pada provinsi Papua. Sementara itu, tingkat kemiskinan terendah 3.33 di tahun 2019 pada provinsi Sulawesi Tengah. Standar deviasi pada kemiskinan dalam penelitian ini lebih kecil dari pada nilai rata-rata yaitu sebesar 5.90 sehingga dapat dikatakan data yang digunakan variatif. Berikut adalah gambaran rata-rata kemiskinan Indonesia tahun 2015 sampai 2019 ditunjukkan pada gambar 4.1.

**Gambar 4. 1 Persentase Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015 sampai 2019**



Sumber : Data diolah (2020)

Gambar 4.1 menunjukkan rata-rata persentase kemiskinan tahun 2015 sampai tahun 2019. Papua merupakan provinsi dengan rata-rata persentase kemiskinan tertinggi dengan jumlah sebesar 27,81 persen selama kurun waktu lima tahun. Hal ini disebabkan karena minimnya infrastruktur yang terkait pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat suatu kabupaten/kota diharapkan semakin sejahtera masyarakatnya. Pada akhirnya inilah yang membuat orang/keluarga dapat keluar dari garis kemiskinan.

Dari gambar 4.1 tersebut dapat dilihat bahwa ada 16 provinsi yang jumlah kemiskinannya di atas rata-rata Indonesia, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku,

Gorontalo, Aceh, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur dan Sulawesi Barat. Papua merupakan provinsi yang memiliki rata-rata persentase kemiskinannya tertinggi tahun 2015 hingga 2019 di Indonesia yaitu sebesar 27.81 persen dari jumlah penduduk miskin. Sedangkan provinsi dengan rata-rata persentase kemiskinan terendah tahun 2015 hingga 2019 yaitu Provinsi DKI Jakarta sebesar 3,65 persen. Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan contoh bagi provinsi lainnya terutama pada proses pembangunan baik secara fisik/non fisik sehingga tercipta kesejahteraan.

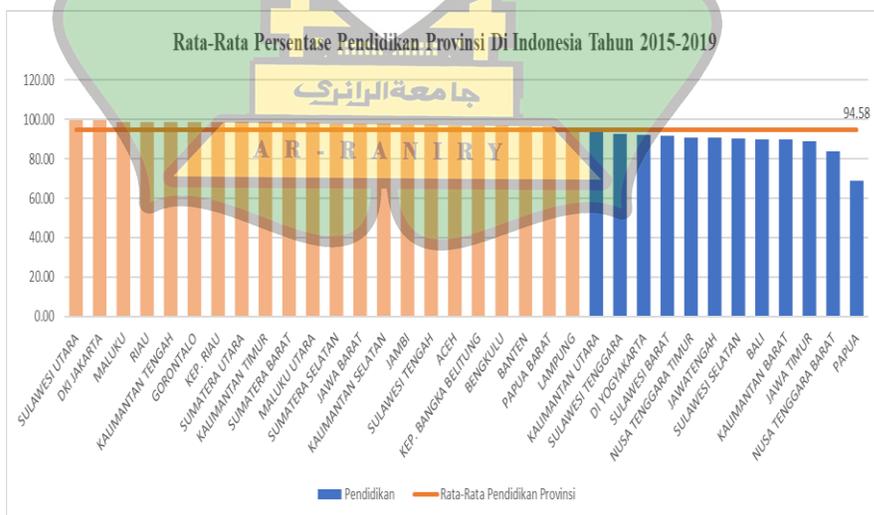
Dibandingkan dengan provinsi Aceh, Aceh menjadi daerah termiskin di Pulau Sumatera dan berada pada urutan ke 6 secara nasional. Rata-rata persentase kemiskinan di Aceh tahun 2014 sampai 2019 yaitu sebesar 16,21 persen. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk miskin di Aceh bekerja di sektor pertanian dan mayoritasnya bekerja dengan status berusaha sendiri. Selain itu, keterbatasan lapangan kerja juga menjadi penyebab kemiskinan di Aceh karena hal ini dapat meningkatkan pengangguran yang sangat berhubungan terhadap kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga merupakan hal yang sangat penting dalam kemiskinan. Aceh lebih memprioritaskan pembangunan fisik, sehingga program pemberdayaan ekonomi yang produktif seperti memprioritaskan modal usaha sangat masih belum efektif. Kemudian buntutnya masyarakat Aceh dalam

mengakses sumber daya ekonomi juga menjadi penyebab meningkatnya kemiskinan di Aceh.

#### 4.1.2 Pendidikan

Pendidikan merupakan variabel independen pada penelitian ini yang dihitung berdasarkan Indikator Angka Melek Huruf (AMH) di Indonesia. Berdasarkan tabel 4.1 dari 170 sampel diperoleh nilai rata-rata (mean) pendidikan adalah sebesar 94,57 dan pendidikan tertinggi adalah 99,92. Sementara itu, tingkat pendidikan terendah 64,60. Standar deviasi pada pendidikan dalam penelitian ini lebih kecil dari pada nilai rata-rata yaitu sebesar 5,92. Sehingga dapat dikatakan data yang digunakan variatif. Berikut adalah gambaran rata-rata pendidikan di Indonesia tahun 2015 sampai 2019 ditunjukkan pada gambar 4.2.

**Gambar 4. 2 Persentase Pendidikan (AMH) di Indonesia tahun 2015 sampai 2019**



Sumber : Data diolah (2020)

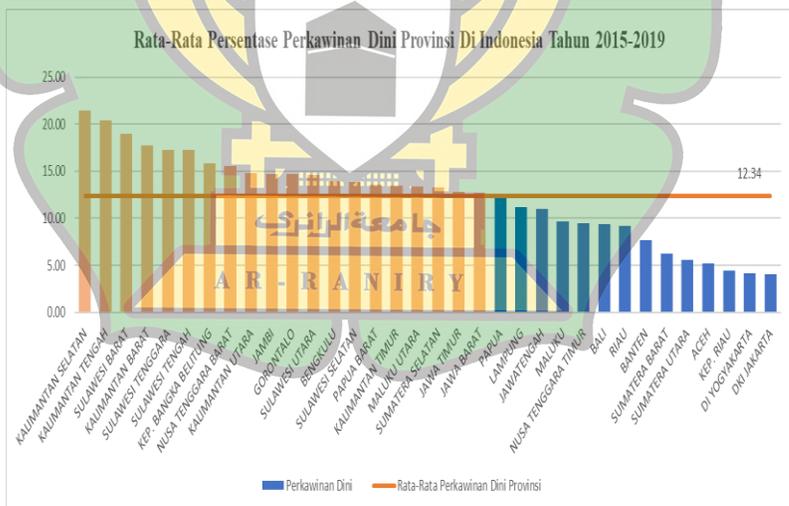
Gambar 4.2 menunjukkan rata-rata pendidikan di Indonesia pada tahun 2015 sampai tahun 2019. Pendidikan setiap provinsi di Indonesia mengalami trend kenaikan setiap tahunnya. Provinsi Sulawesi Utara menempati rata-rata pendidikan dengan indikator angka melek huruf (AMH) tertinggi di Indonesia pada tahun 2015 hingga 2019. Rata-rata tingkat pendidikan provinsi Sulawesi Utara tahun 2015 hingga 2019 yaitu sebesar 99,75. Salah satu faktor penyebab angka pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara tinggi yaitu karena masyarakat Sulawesi Utara baik yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan memiliki keunggulan dari sisi pendidikan dan juga kepedulian pemerintah dalam akses membangun pendidikan yang lebih baik. Kesejahteraan dimasyarakat dapat tergambarkan dari kehidupan yang layak dan bahagia. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah dalam rangka perbaikan pendidikan bangsa. Namun demikian beberapa persoalan pendidikan masih menjadi tantangan yang harus dibenahi, mulai dari permasalahan akses, pemerataan, dan mutu pendidikan.

Dari gambar 4.2 tersebut dapat dilihat bahwa ada 12 provinsi yang jumlah pendidikannya masih di bawah rata-rata pendidikan angka melek huruf (AMH) di Indonesia. yaitu Provinsi Papua, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bali, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, DI Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Utara.

### 4.1.3 Perkawinan Usia Dini

Perkawinan Usia Dini merupakan variabel independen pada penelitian ini. Berdasarkan tabel 4.1 dari 170 sampel diperoleh nilai rata-rata (mean) perkawinan usia dini adalah sebesar 12,34 dan perkawinan usia dini tertinggi adalah 23,19. Sementara itu, tingkat perkawinan usia dini terendah adalah 2,21. Standar deviasi pada perkawinan usia dini dalam penelitian ini lebih kecil dari pada nilai rata-rata yaitu sebesar 4,75 sehingga dapat dikatakan data yang digunakan variatif. Berikut adalah gambaran rata-rata perkawinan dini di Indonesia tahun 2015 sampai 2019 ditunjukkan pada gambar 4.3

**Gambar 4. 3 Persentase Perkawinan Usia Dini tahun 2015 hingga 2019**



Sumber : Data diolah (2020)

Gambar 4.3 menunjukkan rata-rata tingkat perkawinan usia dini di Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Perkawinan usia dini di Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya. Provinsi Kalimantan Selatan menempati rata-rata perkawinan usia dini tertinggi di Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019, dan Provinsi DKI Jakarta menempati rata-rata terendah dalam perkawinan usia dini di Indonesia tahun 2015 sampai 2019 yaitu sebesar 4,03 persen. Salah satu faktor penyebab perkawinan usia dini di Provinsi Kalimantan Selatan adalah kurangnya akses pendidikan, kurangnya bekal pengetahuan umum tentang perkawinan usia dini dan juga faktor dukungan keluarga dan juga lingkungan sekitar, faktor tingkat ekonomi keluarga yang rendah banyak juga menyebabkan orang tua menikahkan anaknya di usia yang masih muda.

## **4.2 Analisis Data**

### **4.2.1 Penentuan Model Estimasi**

Penentuan model estimasi dapat dilakukan dengan 3 uji yang berbeda yaitu Chow-test, Housman-test dan Lagrange Multiplier-test yang mana masing-masing uji tersebut membantu untuk memilih model terbaik yang akan digunakan. Adapun hipotesa pada pengujian masing-masing uji yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4. 2**  
**Hipotesa Chow-test dan Housman-test**

Alat Penguji	Hipotesa	Ketentuan	Keterangan
Chow-test	H <sub>0</sub> = Model yang digunakan adalah <i>Common Effect Model</i>	Jika nilai p- value lebih besar dari pada nilai signifikansi ( $p > \alpha$ ) maka H <sub>0</sub> diterima	Model yang digunakan adalah <i>Common Effect Model</i>
		Jika nilai p- value lebih kecil dari pada nilai signifikansi ( $p < \alpha$ ) maka H <sub>0</sub> ditolak dan H <sub>a</sub> diterima	Model yang digunakan adalah <i>fix Effect Model</i>
<i>Housman-test</i>	H <sub>0</sub> = Model yang digunakan adalah <i>Random Effect Model</i>  H <sub>a</sub> = Model yang digunakan adalah <i>Fix Effect Model</i>	Jika nilai p- value lebih besar dari pada nilai signifikan ( $p > \alpha$ ) maka H <sub>0</sub> diterima	Model yang digunakan adalah <i>Random Effect Model</i>
		Jika nilai p- value lebih kecil dari pada nilai signifikansi ( $p < \alpha$ ) maka H <sub>0</sub> ditolak dan H <sub>a</sub> diterima	Model yang digunakan adalah <i>Fix Effect Model</i>

Sumber : Data diolah (2020)

Penelitian ini menggunakan jenis data panel yang memiliki tiga model regresi yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) untuk mengetahui

jenis model yang terbaik untuk digunakan maka perlu dilakukan uji penentuan model estimasi. Ringkasan hasil pengujian *Chow-test* dan *Housman-test* pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 3**  
**Hasil Chow-test dan Housman-test**

Model Estimasi	Alat Pengujian	Chi-Square	p-value	Model yang digunakan
<i>Common Effect Model</i> (PLS) atau <i>Fix Effect Model</i> (FEM)	<i>Chow-test</i>	579.018011	0.0000	<i>Fixed Effect Model</i> (FEM)
<i>Fix Effect Model</i> (FEM) atau <i>Random Effect Model</i> (REM)	<i>Housman-test</i>	1.284405	0.5261	<i>Fixed Effect Model</i> (FEM)

Sumber: Data Diolah oleh Penulis (2020)

Berdasarkan tabel 4.3 maka dapat diketahui bahwa pada pengujian *Chow-test* dihasilkan nilai *p-value* sebesar 0,0000 yang menunjukkan hasil pengujian tersebut signifikansi ( $p\text{-value} < 100\%$ ),  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima maka model terbaik yang dipilih adalah *Fix Effect Model* (FEM). Selanjutnya pengujian *Housmantest* menghasilkan nilai *p-value* sebesar 0.5261 yang menunjukkan hasil pengujian tersebut signifikan ( $p\text{-value} < 100\%$ ) sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima maka model terbaik yang dipilih adalah *Fix Effect Model* (FEM). Hasil dari pengujian *Chowtest* dan *Housman-test* sama-sama menunjukkan model terbaik yang dipilih adalah *Fix effect Model* maka dari itu tidak perlu lagi dilakukan uji *Lagrange Multiplier-test*.

#### 4.2.2 Uji Kriteria Statistik (Uji Signifikansi)

Uji kriteria statistik yang dilakukan pada penelitian yang meliputi uji t (uji signifikansi parameter/uji parsial), uji F (uji signifikansi simultan). Berikut adalah ringkasan hasil dari estimasi *Fix Effect Model* yaitu:

#### Gambar 4. 4 Ringkasan Hasil dari Estimasi Fix Effect Model

Dependent Variable: KM

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 07/23/20 Time: 10:41

Sample: 2015 2019

Periods included: 5

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 170

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PDN	0.061940	0.020036	3.091434	0.0024
PDK	-0.446231	0.054884	-8.130441	0.0000
C	52.45810	5.227173	10.03565	0.0000

#### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics			
R-squared	0.994308	Mean dependent var	25.10888
Adjusted R-squared	0.992821	S.D. dependent var	15.87020
S.E. of regression	1.025171	Sum squared resid	140.8306
F-statistic	668.7676	Durbin-Watson stat	2.104635
Prob(F-statistic)	0.000000		

R-squared	0.975300	Mean dependent var	11.02047
Sum squared resid	145.7028	Durbin-Watson stat	1.973290

Sumber: Data Diolah oleh Penulis (2020)

## 1. Uji Signifikansi Parsial

- a. Variabel Pendidikan Angka Melek Huruf (AMH) memiliki probability kurang dari 5% yaitu sebesar 0,0000 sehingga  $H_{01}$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara pendidikan dengan kemiskinan.
- b. Variabel Perkawinan Usia Dini memiliki probability lebih kecil dari 5% yaitu sebesar 0,0024 sehingga  $H_{02}$  ditolak dan  $H_2$  diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara perkawinan usia dini dengan kemiskinan.

## 2. Uji signifikansi Simultan

Berdasarkan hasil pengujian pada gambar 4.4 di atas, maka diperoleh nilai F statistik sebesar 0,0000 yang mana nilai tersebut memiliki nilai probability yang lebih kecil dari 5% sehingga semua variabel independen diasumsikan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada taraf kepercayaan 95%.

### 4.3 Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi terhadap data panel penelitian, perlu dilakukan prasyarat analisis yaitu multikolinearitas:

**Tabel 4. 4**  
**Uji Multikolinieritas**

	Kemiskinan	Pendidikan	Perkawinan Dini
Kemiskinan	1.000000	-0.502358	-0.021626
Pendidikan	-0.502358	1.000000	-0.107585
Perkawinan Dini	-0.021626	-0.107585	1.000000

Sumber: Data Diolah oleh Penulis (2020)

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai korelasi antara kemiskinan dengan pendidikan adalah -0,502358. Kemiskinan dengan perkawinan usia dini adalah -0,021626. Pendidikan perkawinan dini adalah -0,107585. Dari nilai korelasi antara variable tersebut dapat kita lihat bahwa kemiskinan dengan pendidikan memiliki nilai korelasi sebesar  $(-0,502358) < R\text{-Square}$  (0,994308) tidak terjadi multikolinieritas. Bahwa secara keseluruhan tidak terjadi multikolinieritas.

### 4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah menentukan model estimasi terbaik sehingga terpilihnya *Fix Effect Model* (FEM) maka selanjutnya dilakukan analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan pemodelan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen yang lebih dari satu variabel. Regresi linear berganda juga digunakan untuk melihat arah hubungan baik positif atau

negatif dari masing-masing variabel selain itu juga dapat memprediksi nilai dari variabel dependen jika variabel independennya mengalami kenaikan atau penurunan nilai. Penelitian ini menggunakan kemiskinan sebagai variabel dependen dan pendidikan dan perkawinan usia dini sebagai variabel independennya. Persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

$$\text{Kemiskinan}_{it} = 52,45 - 0,446 (\text{Pendidikan}_{it}) + 0,061 (\text{Perkawinan Usia Dini}_{it}) \dots (4.1)$$

Persamaan regresi berganda maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta adalah sebesar 52,45 menunjukkan jika semua variabel independen yaitu pendidikan dan perkawinan usia dini dianggap tetap maka nilai kemiskinan yang dilambangkan Y adalah sebesar 52,45 persen.
2. Nilai koefisien pendidikan ( $X_1$ ) -0,446 hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan jika variabel lainnya diabaikan atau dianggap tetap (ceteris paribus) maka setiap kenaikan 1 persen pendidikan, kemiskinan juga ikut turun sebesar -0,446 persen.
3. Nilai koefisien perkawinan usia dini ( $X_2$ ) sebesar 0,061 hal ini menunjukkan bahwa perkawinan usia dini berpengaruh positif terhadap kemiskinan dan jika variabel lainnya diabaikan atau dianggap tetap (ceteris paribus) maka setiap

kenaikan 1 persen perkawinan usia dini, kemiskinan juga ikut naik sebesar 0,061 persen.

#### **4.5 Pembahasan dan Hasil**

Pada bab pembahasan ini akan dibahas pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan, pengaruh perkawinan usia dini terhadap kemiskinan dan pengaruh pendidikan, perkawinan usia dini terhadap kemiskinan.

##### **4.5.1 Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan**

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Variabel pendidikan yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif dan efisien wilayah dalam menjalankan pendidikan yang dimilikinya. Semakin besar tingkat pendidikan maka semakin baik karena hal tersebut menandakan bahwa wilayah di Indonesia dapat memanfaatkan pendidikan yang ada dengan efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang bermutu dan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Variable pendidikan ini juga menunjukkan keberhasilan atau kegagalan pihak pemerintah dalam memaksimalkan tingkat pendidikan. Asumsinya pendidikan yang baik menunjukkan wilayah menjalankan pendidikan dengan efektif dan efisien serta pendidikan dari wilayah tersebut juga akan semakin baik. Hasil dari analisis regresi dalam penelitian ini menemukan bahwa pendidikan memiliki nilai koefisien yang negatif sehingga dapat diartikan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di

Indonesia. Nilai probability pendidikan adalah sebesar 0.0000 sehingga  $H_{01}$  ditolak dan  $H_1$  diterima artinya pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian ini telah sesuai dengan teori yang ada, yang menunjukkan bahwa pendidikan memiliki hubungan sebab akibat terhadap kemiskinan, dimana pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendah tingginya kemiskinan yang ada di Indonesia. Artinya, apabila tingkat pendidikan baik maka akan memberikan dampak baik kepada tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh wijayanto (2010) dan yang memperoleh hasil bahwa pendidikan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan.

#### **4.5.2 Pengaruh Perkawinan Usia Dini terhadap Kemiskinan**

Hasil dari analisis regresi pada penelitian perkawinan usia dini ini menemukan bahwa memiliki probability lebih kecil dari 5% yaitu sebesar 0.0024 dengan koefisien 0,061940 sehingga  $H_{02}$  ditolak dan  $H_2$  diterima yang berarti bahwa perkawinan usia dini berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Karna semakin tinggi pendapatan atau perekonomian dalam satu keluarga juga meningkatkan umur perkawinan. Penelitian ini menerima hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniawati (2017) yang menghasilkan bahwa perkawinan usia dini berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia. Adapun menikah dini, yaitu perkawinan

usia dini atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah atau mandub, demikian menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi yang *Artinya*: “*Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu*” (HR. Bukhari dan Muslim).



## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh pendidikan (AMH) dan perkawinan usia dini terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2015 sampai 2019 dalam penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini:

1. Variabel pendidikan terdapat pengaruh signifikan secara parsial terhadap kemiskinan di Indonesia. Variabel pendidikan memiliki nilai koefisien sebesar  $-0,446231$  dan probability sebesar  $0,0000$  hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, setiap kenaikan 1 persen pendidikan akan menurunkan kemiskinan sebesar  $-0,446231$  persen.
2. Variabel perkawinan usia berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kemiskinan di Indonesia. Variabel perkawinan usia dini memiliki probability di bawah 5% yaitu sebesar  $0,0024$  dengan nilai koefisien sebesar  $0,061940$  sehingga perkawinan usia dini berpengaruh terhadap perubahan kemiskinan, ini artinya bahwa perubahan perkawinan usia dini yang terjadi di Indonesia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan sebesar  $0,061940$  persen.

3. Pendidikan dan perkawinan usia dini ada hubungannya secara spasial dengan tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini sangat bergantung dari proses manusia ketika menjalani kehidupan. Sehingga untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan baik juga perkawinan usia dini yang rendah perlu adanya upaya yang sangat kuat dari diri manusia sendiri dan interaksi terhadap lingkungannya begitupula dukungan dari pemerintah sehingga diperlukan kerjasama antar kelompok masyarakat dan pemerintah. Nilai signifikansi uji F sebesar 0,000 artinya, secara simultan atau bersama-sama pendidikan dan perkawinan usia dini berpengaruh terhadap kemiskinan.

## **5.2 Keterbatasan**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah periode waktu yang digunakan hanya lima tahun, akan lebih baik jika periode waktunya lebih lama sehingga dapat lebih menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan.

## **5.3 Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil, maka dapat diberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

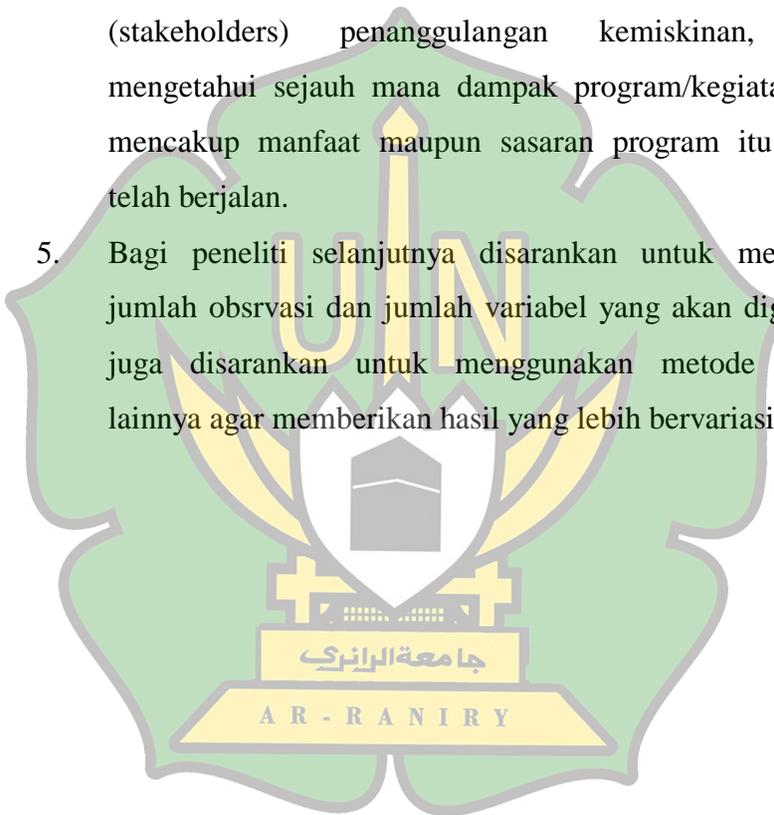
1. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa variabel pendidikan dan perkawinan usia dini berpengaruh terhadap

tingkat kemiskinan, sehingga pemerintah hendaknya memberikan perhatian lebih terhadap variabel-variabel tersebut dan dapat memberikan kebijakan yang tepat dalam mengatasi masalah kemiskinan.

2. Salah satu penyebab dari tingginya tingkat kemiskinan, diakibatkan oleh pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan minimum yang layak. Dalam penelitian ini terbukti pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan yang diperlukan adalah kebijakan ekonomi yang Pro Growth, Pro Job, Pro Poor dan Pro Environment. Pendidikan masyarakat dapat ditingkatkan melalui pembangunan yang inklusif, melibatkan dan bermanfaat kepada seluruh masyarakat terutama masyarakat miskin. Jika pendidikan masyarakat terus meningkat maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat, yang kemudian akan berdampak pula pada peningkatan pengeluaran masyarakat untuk pendidikan dan kesehatan. Dengan meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan maka diharapkan penduduk dapat dijadikan sebagai modal pembangunan yang handal.
3. Setiap daerah mempunyai karakteristik dan masalah kemiskinan yang berbeda dengan daerah lainnya. Oleh sebab itu strategi penanggulangan kemiskinan daerah perlu

disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kemampuan pada masing-masing daerah.

4. Pemerintah telah merencanakan program penanggulangan kemiskinan yang mencakup berbagai bidang. Oleh karena itu, diperlukan monitoring dan evaluasi oleh semua pelaku (stakeholders) penanggulangan kemiskinan, untuk mengetahui sejauh mana dampak program/kegiatan yang mencakup manfaat maupun sasaran program itu sendiri telah berjalan.
5. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah obsrvasi dan jumlah variabel yang akan digunakan juga disarankan untuk menggunakan metode analisis lainnya agar memberikan hasil yang lebih bervariasi.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Adhim, M.F. (2002). *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani Press.

Ajija, S. R., Sari, D. W., & dkk. (2010). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.

Anshori, M., & Iswati, S. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP).

Arsyat, L. (2015). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Arfiani, Devi. (2009). *Berantas Kemiskinan*. Semarang: Alprin

Atabik, A. (2015). Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*. 2(2). 340-361.

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2015).

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2016).

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2017).

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2018).

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2019).

Badan Pusat Statistik. (2020). Persentase Penduduk Miskin di Indonesia.

Basri, F. (2002). *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

- Dadan, M. (2006). *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian*. Yogyakarta: Insania Citra Press.
- Djauzak, A. (2009). Dampak Kemiskinan terhadap pendidikan. [www.kompas.com](http://www.kompas.com).
- Doshi, K. P. (2000). *Inequality and economic Growth*, University of San Diego.
- Fadhilah, R., & Vincent, H.W. (2004). *Analisis Waktu Tunggu Tenaga Kerja Terdidik Di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta Tahun 2003*.
- Gaiha, R. 1993. *Design of Poverty Alleviation Strategy in Rural Areas*. Roma: FAO.
- Gillis, M. et al. (2000). *Economic of Development*. New York: WW Norton & Company Inc.
- Gujarati, D. N. (2004). *Basic Econometrics (4th ed)*. New York: The McGraw-Hill Companies.
- Kampono, N. 2007. *Pernikahan Dini Tingkatkan Resiko Kanker Servic*. Semarang: Kelud Raya
- Kartasmita, G. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: CIDES.
- Narwati, N. (2008). Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*. 10(1). 1-11.
- Priyatno, D. (2010). *Paham Analisis Statistika Data Dengan SPSS*. Yogyakarta: Mediakom.
- Qadir, A. (2001). *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Prasada.

- Rejekiningsih, T. W. (2011). Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Kota Semarang Dari Dimensi Kultural. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 1. 28-44.
- Rustanto, B. (2015). *Menangani Kemiskinan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Setiadi, E.M. & Usman, K. (2011). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soemiyati, (1986). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. (2013). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Todaro, Michael dan Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga. Penterjemah: Drs. Haris Munandar, MA; Puji A.L, SE
- Tri R. K., (1982). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung.
- Tulus H. Tambunan. (2001). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Umur Perkawinan.
- Umniah L. W. (2004) *Pembebasan: Relasi Buruh-Majikan*, Yogyakarta: Pustaka Alif.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Data Persentase Kemiskinan di Indonesia tahun 2015 sampai 2019

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	17,09	16,58	16,40	15,82	15,16
Sumatera utara	10,66	10,31	9,75	9,08	8,73
Sumatera Barat	7,01	7,11	6,81	6,6	6,35
Riau	8,62	7,82	7,59	7,3	6,99
Jambi	8,99	8,39	8,04	7,88	7,55
Sumatera Selatan	14,01	13,46	13,14	12,81	12,63
Bengkulu	17,52	17,17	16,02	15,42	15,07
Lampung	13,94	14,07	13,36	13,07	12,46
Kep. Bangka Belitung	5,11	5,13	5,25	5,01	4,56
Kep. Riau	6,01	5,91	6,09	6,01	5,85
DKI Jakarta	3,77	3,75	3,75	3,56	3,45
Jawa Barat	9,55	8,86	8,27	7,35	6,86
Jawa Tengah	13,45	13,23	12,62	11,25	10,69
DI Yogyakarta	14,03	13,22	12,69	11,97	11,57
Jawa Timur	12,31	11,95	11,48	10,91	10,28
Banten	5,82	5,39	5,52	5,24	5,01
Bali	4,99	4,2	4,19	3,96	3,7
Nusa Tenggara Barat	16,82	16,25	15,56	14,69	14,22
Nusa Tenggara Timur	22,59	22,1	21,61	21,19	20,85
Kalimantan Barat	8,23	7,93	7,87	7,57	7,38
kalimantan Tengah	5,92	5,51	5,31	5,13	4,89
Kalimantan Selatan	4,85	4,68	4,71	4,59	4,51
Kalimantan Timur	6,16	6,05	6,13	6,04	5,92
Kaliamantan Utara	6,28	6,61	7,09	6,97	6,56
Sulawesi Utara	8,81	8,27	8	7,69	7,58
Sulawesi Tengah	14,36	14,27	14,18	13,85	3,33
Sulawesi Selatan	9,75	9,32	9,43	8,96	8,62
Sulawesi Tenggara	13,32	12,82	12,39	11,47	11,14
Gorontalo	18,24	17,6	17,39	16,31	15,41
Sulawesi Barat	12,15	11,46	11,24	11,23	10,98
Maluku	19,43	19,22	18,37	17,98	17,67
Maluku Utara	6,53	6,37	6,39	6,63	6,84
Papua Barat	25,77	25,55	24,11	22,83	21,84
Papua	28,28	28,47	27,69	27,58	27,04

**Lampiran 2. Data Pendidikan Angka Melek Huruf (AMH) di  
Indonesia 2015 sampai 2019**

Provinsi	Pendidikan Angka Melek Huruf (AMH) di Indonesia (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	96,53	96,51	97,09	97,41	97,22
Sumatera utara	98,04	98,38	98,61	98,70	98,47
Sumatera Barat	97,85	98,27	98,69	98,87	98,42
Riau	98,16	98,56	98,83	98,88	98,90
Jambi	96,75	97,11	97,17	97,21	97,50
Sumatera Selatan	97,52	97,53	98,00	98,29	97,96
Bengkulu	96,27	96,37	96,82	96,86	97,00
Lampung	94,89	95,42	95,47	95,72	95,88
Kep. Bangka Belitung	96,78	96,35	96,91	97,11	96,97
Kep. Riau	98,53	98,48	98,46	98,82	98,47
DKI Jakarta	99,33	99,43	99,55	99,57	99,61
Jawa Barat	97,14	97,51	97,81	97,90	97,67
Jawa Tengah	90,01	90,38	90,68	90,90	91,34
DI Yogyakarta	91,78	92,07	92,66	92,16	92,68
Jawa Timur	88,17	88,41	88,85	89,53	89,75
Banten	96,14	96,38	96,34	96,32	96,68
Bali	88,94	89,23	89,48	91,66	90,39
Nusa Tenggara Barat	83,50	83,42	83,42	83,49	85,30
Nusa Tenggara Timur	90,12	89,97	90,57	91,87	91,42
Kalimantan Barat	89,10	88,93	89,48	90,20	90,65
kalimantan Tengah	98,45	98,36	98,91	98,86	98,66
Kalimantan Selatan	97,17	97,22	97,63	97,76	97,75
Kalimantan Timur	98,12	98,25	98,53	98,75	98,54
Kaliamantan Utara	93,08	94,01	94,21	95,22	94,63
Sulawesi Utara	99,56	99,71	99,92	99,83	99,74
Sulawesi Tengah	96,41	96,88	97,22	97,88	97,31
Sulawesi Selatan	89,47	89,63	90,19	90,87	91,11
Sulawesi Tenggara	91,69	91,97	92,51	92,96	93,26
Gorontalo	98,45	98,39	98,77	98,60	98,61
Sulawesi Barat	90,88	91,31	91,23	92,45	92,74
Maluku	98,39	98,61	99,03	99,28	98,92
Maluku Utara	97,87	98,20	98,16	98,30	98,31
Papua Barat	95,50	95,97	96,34	96,70	96,42
Papua	65,47	64,60	71,26	73,07	70,72

**Lampiran 3. Data Perkawinan Usia Dini di Indonesia 2015  
sampai 2019**

Provinsi	Perkawinan Usia Dini di Indonesia (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	4,17	4,62	5,29	5,12	6,59
Sumatera utara	6,20	5,72	4,90	4,61	6,50
Sumatera Barat	5,51	6,83	6,68	5,99	5,96
Riau	9,40	10,52	7,93	9,75	8,30
Jambi	14,98	14,51	12,71	16,74	14,78
Sumatera Selatan	13,95	13,29	12,07	13,65	13,53
Bengkulu	12,77	14,61	14,33	14,50	13,24
Lampung	11,48	11,81	10,70	9,88	12,10
Kep. Bangka Belitung	15,58	18,16	14,22	15,98	15,48
Kep. Riau	4,11	4	4,68	5,64	3,82
DKI Jakarta	4,88	3,18	4,06	4,93	3,12
Jawa Barat	14,14	12,24	13,26	11,47	12,33
Jawa Tengah	11,47	10,37	11,04	11,72	10,19
DI Yogyakarta	4,73	2,21	6,20	4,76	3,06
Jawa Timur	14,68	13,32	12,71	12,14	11,11
Banten	8,78	9,06	6,78	7,78	6,00
Bali	8,52	9,17	8,55	10,45	10,18
Nusa Tenggara Barat	14,68	16,02	15,48	15,38	16,09
Nusa Tenggara Timur	9,34	10,53	8,78	10,22	8,51
Kalimantan Barat	17,28	19,07	17,46	16,95	17,86
kalimantan Tengah	21,9	20,94	19,13	19,67	20,16
Kalimantan Selatan	23,19	23,12	17,63	22,26	21,18
Kalimantan Timur	14,78	13,9	11,54	14,85	12,36
Kaliamantan Utara	14,93	16,57	12,42	17,29	12,94
Sulawesi Utara	16,32	15,34	14,88	12,78	13,54
Sulawesi Tengah	19,32	16,65	15,84	18,09	16,25
Sulawesi Selatan	13,8	14,76	14,10	14,48	12,11
Sulawesi Tenggara	16,88	19,08	18,96	15,03	16,56
Gorontalo	15,90	14,51	15,29	14,74	13,16
Sulawesi Barat	21,37	19,37	19,43	15,67	19,17
Maluku	9,88	10,81	8,94	8,99	9,54
Maluku Utara	10,01	17,21	13,36	11,97	14,36
Papua Barat	14,67	12,80	11,16	15,86	13,20
Papua	14,20	12,34	11,52	11,99	11,21

## Lampiran 4. Estimasi Fix Effect Model

Dependent Variable: KM

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 07/23/20 Time: 10:41

Sample: 2015 2019

Periods included: 5

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 170

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PDN	0.061940	0.020036	3.091434	0.0024
PDK	-0.446231	0.054884	-8.130441	0.0000
C	52.45810	5.227173	10.03565	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.994308	Mean dependent var		25.10888
Adjusted R-squared	0.992821	S.D. dependent var		15.87020
S.E. of regression	1.025171	Sum squared resid		140.8306
F-statistic	668.7676	Durbin-Watson stat		2.104635
Prob(F-statistic)	0.000000			
AR - RANTRY				
R-squared	0.975300	Mean dependent var		11.02047
Sum squared resid	145.7028	Durbin-Watson stat		1.973290

## Lampiran 5. Hasil Uji Chow-test

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	118.342597	(33,134)	0.0000
Cross-section Chi-square	579.018011	33	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: KM

Method: Panel Least Squares

Date: 07/21/20 Time: 22:15

Sample: 2015 2019

Periods included: 5

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 170

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PDK	-0.509420	0.066884	-7.616417	0.0000
PDN	-0.095117	0.083289	-1.142003	0.2551
C	60.37263	6.528627	9.247369	0.0000
R-squared	0.258157	Mean dependent var		11.02047
Adjusted R-squared	0.249273	S.D. dependent var		5.908073
S.E. of regression	5.119021	Akaike info criterion		6.121293
Sum squared resid	4376.130	Schwarz criterion		6.176630
Log likelihood	-517.3099	Hannan-Quinn criter.		6.143748
F-statistic	29.05755	Durbin-Watson stat		0.419225
Prob(F-statistic)	0.000000			

## Lampiran 6. Hasil Uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.284405	2	0.5261

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var (Diff.)	Prob.
PDK	-0.386749	-0.428820	0.004301	0.5212
PDN	0.098831	0.073928	0.000531	0.2798

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: KM

Method: Panel Least Squares

Date: 07/21/20 Time: 22:15

Sample: 2015 2019

Periods included: 5

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 170

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	46.37724	10.73423	4.320499	0.0000
PDK	-0.386749	0.111581	-3.466071	0.0007
PDN	0.098831	0.068501	1.442772	0.1514

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.975390	Mean dependent var	11.02047
Adjusted R-squared	0.968962	S.D. dependent var	5.908073
S.E. of regression	1.040859	Akaike info criterion	3.103540
Sum squared resid	145.1738	Schwarz criterion	3.767591
Log likelihood	-227.8009	Hannan-Quinn criter.	3.373004

F-statistic	151.7418	Durbin-Watson stat	1.977979
Prob(F-statistic)	0.000000		

---

